

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Fisik Hutan Lindung Kecamatan Mojooroto

Hutan Lindung yang berada di Kecamatan Mojooroto tepatnya berada pada Gunung Klotok dan Maskumambang. Hutan lindung masuk ke dalam Kecamatan Mojooroto yang ada di Kota Kediri dan Kecamatan Semen di Kabupaten Kediri. Berdasarkan wilayah administrasi hutan lindung berbatasan langsung dengan:

- Sebelah utara : Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
- Sebelah timur : Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame
- Sebelah Selatan : Kecamatan Semen Kabupaten Kediri
- Sebelah barat : Kecamatan Semen dan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

Luas hutan lindung yang berada pada Kecamatan Mojooroto adalah 427 ha, tepatnya 315 ha terdapat pada Kelurahan Pojok sedangkan 112 ha terdapat pada Kelurahan Sukorame. Pada hutan lindung terdapat 3 titik mata air, namun hanya 1 titik mata air yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, dalam memanfaatkan sumber air tersebut masyarakat bekerjasama dengan PDAM dalam pengadaan pipa. Mata air yang dimanfaatkan masyarakat tersebut secara administratif berada pada kawasan lindung yang berada di Kecamatan Semen (Kabupaten Kediri). Jenis tanaman yang berada dalam hutan lindung ini ada beberapa tanaman yaitu pohon jati dan tanaman berdaun lebar. Hutan lindung yang ada di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame ini berbatasan langsung dengan pertanian masyarakat seperti pada gambar 4.6



Gambar 4.6 Pertanian yang berbatasan Langsung dengan Hutan lindung

Sumber: Survey Primer, 2011

Jenis pertanian yang berbatasan langsung dengan hutan lindung yang berada di Kecamatan Mojooroto adalah jenis pertanian pangan yaitu tebu dan padi. Namun sebagian besar adalah tanaman tebu. Kegiatan pertanian ini dikhawatirkan akan semakin merambah hutan lindung, namun dengan adanya pengawasan dari pemerintah kegiatan ini dapat menjadi potensi agar kegiatan terpusat diluar hutan lindung bukan didalam hutan lindung.

A. Kondisi Pertanian

Kondisi pertanian di daerah sekitar hutan lindung meliputi luas pertanian dan jumlah produksi tanaman pertanian yang ada di daerah tersebut. Kelurahan Pojok merupakan kelurahan yang memiliki luas lahan pertanian terluas yang ada di Kecamatan Mojooroto. Namun untuk Kelurahan Sukorame memiliki luas lahan sawah terbesar keempat. Untuk produksi tanaman pertanian di Kelurahan Pojok produksi juga merupakan produktivitas yang tertinggi di Kecamatan Mojooroto jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Sedangkan untuk produksi tanaman pertanian di Kelurahan Sukorame berada pada peringkat kedua penghasil tanaman pertanian. produksi tanaman pertanian dapat dilihat pada tabel 4.8

Tabel 4.8 Produksi Tanaman Pertanian di Daerah Sekitar Hutan Lindung

Kelurahan	Luas (Ha)	Produksi Padi (Kw)	Luas (Ha)	Produksi Jagung (Kw)
Pojok	177	12036	82	5904
Sukorame	107	7276	42	3024

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2010

Berdasarkan hal tersebut pertanian yang ada di sekitar hutan lindung perlu dipertahankan karena memiliki potensi meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Selain itu menurut RTRW Kota Kediri, Kecamatan Mojooroto memiliki produktivitas tanaman pertanian yang paling tinggi di Kota Kediri. Hal ini semakin memperkuat pentingnya mempertahankan pertanian yang ada di Kecamatan Mojooroto terutama pada kelurahan yang memiliki produktivitas pertanian yang tinggi.

B. Perkebunan Campur

Perkebunan campur merupakan salah satu guna lahan yang dapat memberikan nilai ekonomi pada masyarakat. Sama halnya dengan sawah yang ada di Kelurahan Pojok, hasil perkebunan campur di kelurahan tersebut juga merupakan penghasil yang tertinggi di Kecamatan Mojooroto. Sedangkan untuk luas lahannya, Kelurahan Pojok merupakan luas lahan yang paling tinggi dan Kelurahan Sukorame memiliki luasan tertinggi kedua setelah Kelurahan Pojok. Berikut merupakan luasan dan produktivitas perkebunan campur yang ada di sekitar hutan lindung. Berdasarkan tabel 4.9 perkebunan campur juga merupakan

guna lahan yang patut dipertahankan untuk membantu perekonomian masyarakat selain guna lahan sawah.

Tabel 4.9 Produksi Tanaman Perkebunan Campur di Daerah Sekitar Hutan Lindung

Kelurahan	Luas (Ha)	Produksi Ketela Pohon (Kw)	Luas (Ha)	Produksi Kacang tanah (Kw)	Jumlah Pohon	Produksi pisang (Kw)	Jumlah Pohon	Produksi Pepaya (Kw)
Pojok	15	27720	3	36	170	35	27	6
Sukorame	10	1710	1	12	84	17	29	6

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2010

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Mojojoto

4.2.1 Fisik Wilayah

Kecamatan Mojojoto memiliki luasan sebesar 24,601 hektar yang terbagi dalam 14 Kelurahan, 97 RW dan 425 RT dengan rata-rata ketinggian 67 meter dpl dengan rata-rata kedalaman 9 meter. Letak Geografis Kecamatan Mojojoto terletak antara $111^{\circ}97'38.00''$ - $112^{\circ}00'25.1''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}78'69.1''$ - $7^{\circ}85'65.9''$ Lintang Selatan. Adapun batas dari Kecamatan Mojojoto adalah sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara : Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
- Batas sebelah Selatan : Kecamatan Semen Kabupaten Kediri
- Batas sebelah Timur : Kecamatan Kota kota Kediri
- Batas sebelah Barat : Kecamatan Grogol dan Kecamatan Semen Kabupaten Kediri

4.2.2 Topografi

Berikut ini adalah kemiringan lahan tiap kelurahan di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10 Kemiringan Tanah Tiap Kelurahan di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri

No	Kelurahan	Kemiringan				Jumlah Luas (Ha)
		0-2 %	2-15 %	15-40 %	>40 %	
1	Pojok	134,930	207,130	48,560	124,730	515,350
2	Campurejo	140,960	-	-	-	140,960
3	Tamanan	107,760	-	-	-	107,760
4	Banjarmlati	95,455	-	-	-	95,455
5	Banjar kidul	129,992	-	-	-	129,992
6	Lirboyo	103,795	-	-	-	103,795
7	Bandar lor	111,350	-	-	-	111,350
8	Mojojoto	213,000	-	-	-	213,000
9	Sukorame	226,003	81,620	77,660	44,940	430,223
10	Bujel	159,000	-	-	-	159,000
11	Ngampel	146,875	-	-	-	146,875
12	Gayam	129,625	-	-	-	129,625
13	Mrican	110,925	-	-	-	110,925
14	Dermo	65,790	-	-	-	65,790
Jumlah		1.875,460	288,750	126,22	169,67	2.460,10

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2010

Sebagian besar wilayah Kecamatan Mojojoto merupakan daerah yang datar hingga bergelombang. Dapat diketahui kemiringan lahan berdasarkan tingkat kelerengannya pada setiap kecamatan memiliki tingkat kelerengan yang bervariasi, namun secara keseluruhan tingkat kelerengan yang dimiliki Kecamatan Mojojoto adalah landai.

Kelurahan yang memiliki kemiringan landai yaitu 0-2 % adalah semua kelurahan di Kecamatan Mojojoto, namun hanya dua kelurahan yang memiliki kemiringan hingga 40% yaitu Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame yang menjadi kelurahan yang berbatasan langsung secara administratif dengan hutan lindung. Kondisi kemiringan lahan di setiap wilayah merupakan faktor yang penting dalam menentukan kemampuan lahan di Kecamatan Mojojoto.

4.2.3 Intensitas Hujan

Curah hujan di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri berkisar 1500-2500 mm pertahun atau 4,1 mm - 6,85 mm perhari. Kelurahan Tamanan, Kelurahan Banjarmlati, Kelurahan Bandar Kidul adalah kelurahan yang memiliki curah hujan 1500-2500 mm pertahun. Semua kelurahan selain itu memiliki curah hujan 1500-2000 mm pertahun.

4.2.4 Jenis Tanah

Jenis tanah yang berada di Kecamatan Mojojoto adalah alluvial dan andosol. Semua kelurahan yang ada di Kecamatan Mojojoto memiliki jenis tanah alluvial. Namun hanya dua kelurahan yang memiliki dua jenis tanah (alluvial dan andosol) yaitu Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame. Jenis tanah di Kecamatan Mojojoto masing-masing kelurahan dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.11 Jenis Tanah tiap kelurahan di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri

No	Kelurahan	Jenis Tanah		Jumlah Luas (Ha)
		Alluvial	Andosol	
1	Pojok	110,930	404,420	515,350
2	Campurejo	140,960	-	140,960
3	Tamanan	107,760	-	107,760
4	Banjarmlati	95,455	-	95,455
5	Banjar kidul	129,992	-	129,992
6	Lirboyo	103,795	-	103,795
7	Bandar lor	111,350	-	111,350
8	Mojojoto	213,000	-	213,000
9	Sukorame	327,603	102,620	430,223
10	Bujel	159,000	-	159,000
11	Ngampel	146,875	-	146,875
12	Gayam	129,625	-	129,625
13	Mrican	110,925	-	110,925
14	Dermo	65,790	-	65,790
Jumlah		1.953,060	507,040	2.460,10

Sumber: Kecamatan Dalam Angka, 2010

4.2.5 Guna Lahan

Penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Mojooroto dapat menggambarkan kecenderungan perkembangan kota. Perubahan guna lahan akan tiap tahun akan memperjelas guna lahan yang berkembang dengan demikian akan dapat diketahui penanganan yang tepat untuk masalah yang dapat ditimbulkannya. Perubahan guna lahan di Kecamatan Mojooroto Kota Kediri dapat dilihat pada tabel 4.12

Tabel 4.12 Perubahan Guna Lahan di Kecamatan Mojooroto Kota Kediri

Tahun	Penggunaan Lahan (Ha)					
	Permukiman	Sawah	Tegalan	Tanah Kosong	Hutan	Lain-lain
2007	402,38	1144,64	69,63	143,12	360,33	340,00
2008						
2009	635,08	980,78	68,19	59,3	356,21	360,54
2010						
2011						
2012	894,08	712,00	67,22	44,08	350,36	392,36

Sumber: Kota Kediri dalam Angka 2011, Mojooroto dalam Angka 2011

Data guna lahan dari tahun 2007, untuk guna lahan sawah, tegalan, tanah kosong dan hutan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan untuk guna lahan permukiman dan gunalahan lainnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan suatu ancaman, karena guna lahan hutan dari tahun 2007 mengalami penurunan. Dengan bertambahnya lahan terbangun yang begitu pesat yang didominasi oleh guna lahan perumahan, dikhawatirkan akan menyebabkan jumlah penduduk meningkat seiring dengan bertambahnya permukiman.

4.3 Guna Lahan Sekitar Hutan Lindung

Penggunaan lahan disekitar hutan lindung yang dimaksudkan adalah kelurahan yang berbatasan langsung secara administratif dengan hutan lindung yaitu Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame untuk mengetahui guna lahan yang berada di sekitar hutan lindung beserta pengaruhnya.

A. Kelurahan Pojok

Kelurahan Pojok merupakan salah satu kelurahan yang didalamnya terdapat hutan lindung. Luas wilayah Kelurahan Pojok adalah 697 Ha, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kelurahan Sukorame Kota Kediri
- Sebelah timur : Kelurahan Lirboyo Kota Kediri
- Sebelah Selatan : Kelurahan Campurejo Kota Kediri dan Kecamatan Semen Kab. Kediri
- Sebelah barat : Kecamatan Semen Kota Kediri dan Kecamatan Grogol Kab. Kediri

Guna lahan Kelurahan Pojok untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.13. Guna lahan paling luas adalah hutan yaitu 315 Ha (45 %) dan paling kecil adalah rekreasi dan olahraga yaitu dengan luasan 7 Ha (1 %).

Tabel 4.13 Guna Lahan Kelurahan Pojok

No	Guna Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Permukiman	65	9.33
2	Sawah Irigasi	93	13.34
3	Ladang	115	16.5
4	Perkebunan Masyarakat	35	5.02
5	Untuk Bangunan	37	5.31
6	Hutan	315	45.19
7	Rekreasi dan Olahraga	7	1.00
8	Pemukaman	20	2.87
9	TPA	10	1.44
Jumlah		697	100

Sumber: Monografi Kelurahan Pojok Tahun 2012

Pada Kelurahan Pojok guna lahan terbesar kedua setelah hutan adalah sawah irigasi. Guna lahan ini yang merupakan suatu potensi yang dapat mendukung fungsi daerah penyangga untuk melindungi hutan lindung karena dengan adanya perlindungan terhadap sawah irigasi diharapkan guna lahan di daerah ini akan terhindar dari perubahan guna lahan menjadi lahan terbangun.

B. Kelurahan Sukorame

Kelurahan Sukorame merupakan salah satu kelurahan yang didalamnya terdapat hutan lindung dengan luas wilayah 258,5 Ha. Batas administrasinya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Bujel, Kelurahan Gayam, dan Kecamatan Grogol
- Sebelah Timur : Kelurahan Mojoroto dan Kelurahan Grogol
- Sebelah Selatan : Kelurahan Pojok
- Sebelah Barat : Kelurahan Grogol Kabupaten Kediri

Penggunaan lahan di Kelurahan Sukorame yang didominasi oleh hutan lindung. Luas lahan hutan lindung di kelurahan ini adalah 112 Ha (30.5%). Penggunaan lahan di kelurahan Sukorame dapat dilihat pada tabel 4.14

Tabel 4.14 Guna Lahan Kelurahan Sukorame

No	Guna Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Permukiman	108,7	29.60
2	Sawah Irigasi	79	21.51
3	Hutan Lindung	112	30.50
4	Industri	0	0
5	Kantor dan Toko	0,5	0.14
6	Lainnya	67	18.25
Jumlah		258,5	100

Sumber: Monografi Kelurahan Sukorame Tahun 2012

Pada Kelurahan Sukorame guna lahan terbesar hutan yaitu 30,50%. Sedangkan untuk guna lahan terbesar kedua adalah perumahan yaitu 29,6%. Guna lahan perumahan ini dikhawatirkan dapat menjadi masalah yaitu menarik adanya perubahan guna lahan terbangun.

Penggunaan lahan disekitar hutan lindung sangat mempengaruhi dampak yang terjadi terhadap hutan lindung. Pada Kelurahan Pojok luasan sawah irigasi lebih luas dibandingkan pada Kelurahan Sukorame namun pemerintah telah menetapkan bahwa sawah irigasi yang ada di dua kelurahan ini dilindungi keberadaannya. Oleh karena itu guna lahan yang berupa sawah irigasi di kedua kelurahan ini merupakan suatu potensi dalam melindungi hutan lindung beserta penyangganya. Selain potensi pada daerah ini juga terdapat masalah yaitu keberadaan lahan terbangun berupa guna lahan permukiman yang perubahannya tiap tahun selalu bertambah. Guna lahan ini dikhawatirkan dapat menarik guna lahan terbangun lainnya pada daerah ini. Guna Lahan di Kecamatan Mojooroto Kota Kediri dapat dilihat pada gambar 4.7

4.4 Kajian Karakteristik Sosial Ekonomi Sekitar Hutan Lindung

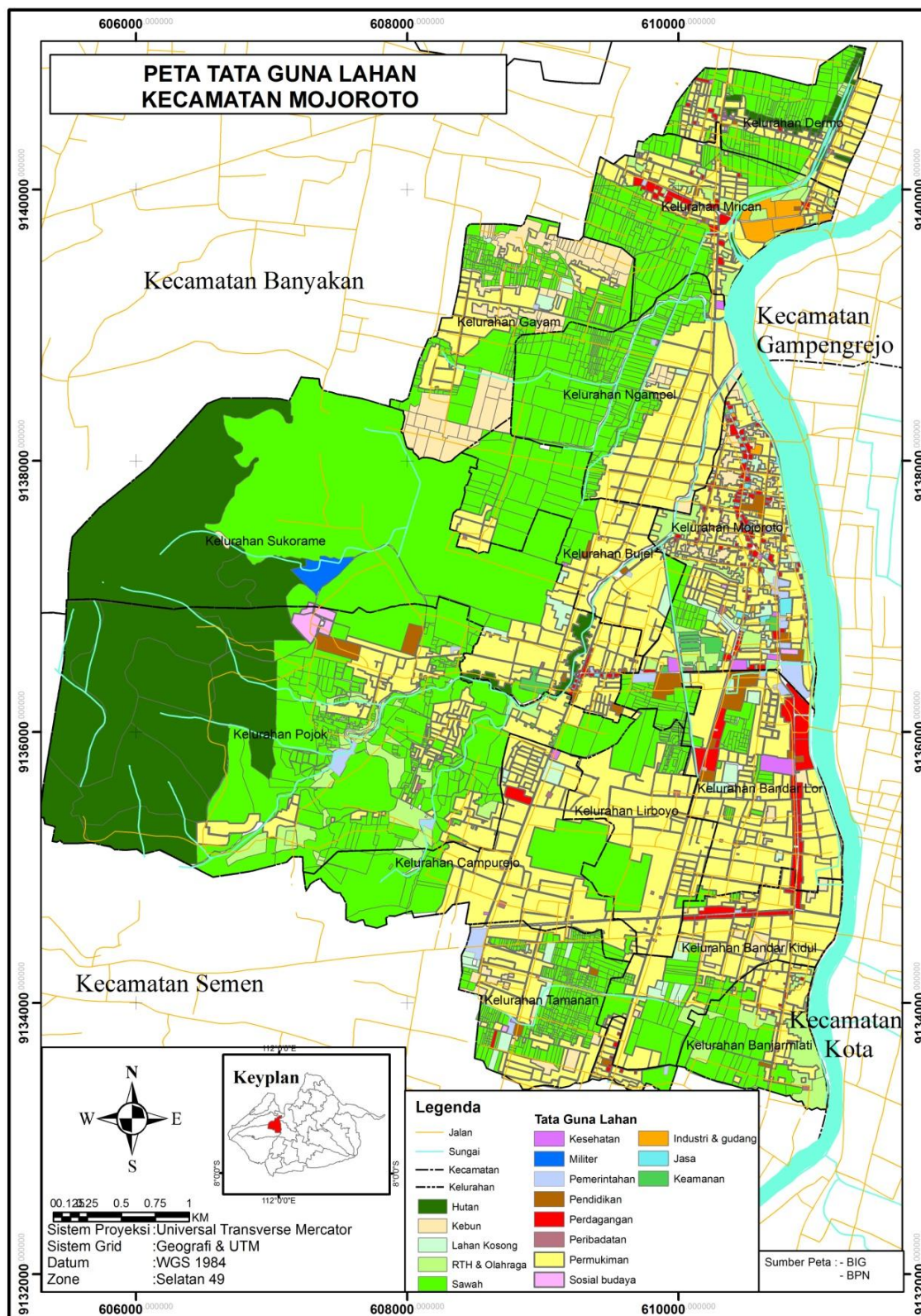
Karakteristik sosial ekonomi yang dibahas mencakup karakter sosial kependudukan, dan karakter ekonomi masyarakat di sekitar hutan lindung yang ada di Kecamatan Mojooroto, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame yang memiliki batas administratif secara langsung dengan hutan lindung.

4.4.1 Kajian Kependudukan

A. Kelurahan Pojok

- Jumlah penduduk

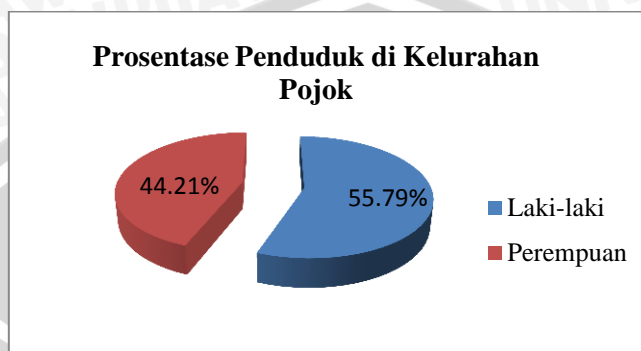
Jumlah penduduk Kelurahan Pojok adalah 8763 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 4872 jiwa dan penduduk perempuan 3861 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yaitu 55,79 % sedangkan penduduk perempuan memiliki prosentase 44,21 %. Untuk lebih jelasnya prosentase jumlah penduduk Kelurahan Pojok dapat dilihat pada gambar 4.8



Gambar 4.7 Peta Guna Lahan Kecamatan Mojoroto

- Struktur Umur

Menurut struktur umur Kelurahan Pojok memiliki penduduk terbanyak dengan usia pelajar yaitu 25-29 tahun dengan prosentase 10,07 % dan penduduk yang berusia 10-14 tahun dengan prosentase 9,91 % dan terendah penduduk berusia lanjut yaitu 60-64 tahun dengan prosentase 3,17 %. Tabel penduduk berdasarkan struktur usia di Kelurahan Pojok dapat dilihat pada tabel 4.15



Gambar 4.8 Prosentase penduduk di Kelurahan Pojok

Sumber: Monografi Kelurahan Pojok Tahun 2012

Tabel 4.15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia di Kelurahan Pojok

No	Umur	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	0-4	668	7.62
2	5-9	766	8.74
3	10-14	882	10.07
4	15-19	723	8.25
5	20-24	870	9.93
6	25-29	772	8.81
7	30-34	656	7.49
8	35-39	634	7.23
9	40-44	810	9.24
10	45-49	564	6.44
11	50-54	456	5.20
12	55-59	318	3.63
13	60-64	278	3.17
14	>65	366	4.18
Jumlah		8763	100

Sumber: Monografi Kelurahan Pojok Tahun 2012

- Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Kelurahan Pojok antara Tidak/ Belum sekolah hingga S3 dengan jumlah terbanyak memiliki pendidikan terakhir SMA yaitu 2167 jiwa atau 24,73%. Adapun rinciannya dilihat pada tabel 4.16

Tabel 4.16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Pojok

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1	Tidak / Belum Sekolah	1446	16.5
2	Tamat SD/ Sederajat	1170	13.35
3	Belum tamat SD/ Sederajat	1868	21.32
4	Tamat SLTP/ Sederajat	1475	16.83

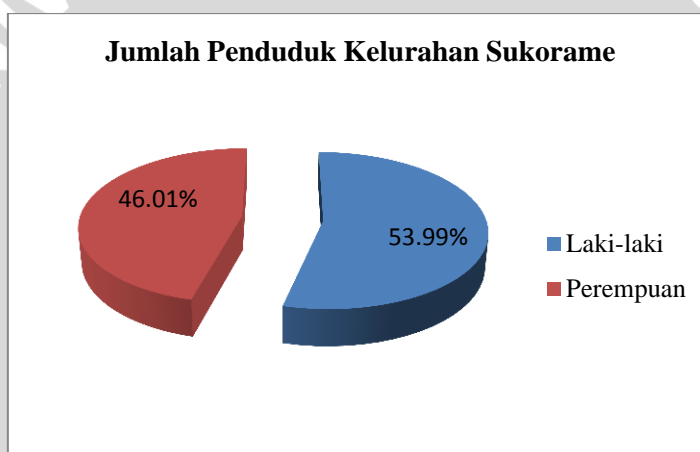
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
5	Tamat SMA / Sederajat	2167	24.73
6	Tamat Diploma I/ II	70	0.799
7	Tamat Akademi/ Diploma III	121	1.381
8	Tamat Sarjana Strata I	413	4.713
9	Tamat Sarjana Strata II	31	0.354
10	Tamat Sarjana Strata III	2	0.023
Jumlah		8763	100

Sumber: Monografi Kelurahan Pojok Tahun 2012

B. Kelurahan Sukorame

- Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Sukorame adalah 5990 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 3234 jiwa dan penduduk perempuan 2756 jiwa. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sukorame memiliki prosentase terbesar laki-laki yaitu 53,99 %. (Gambar 4.9)



Gambar 4.9 Prosentase Penduduk di Kelurahan Sukorame

Sumber: Monografi Kelurahan Pojok Tahun 2012

- Struktur Umur

Menurut struktur umur Kecamatan Mojoroto memiliki penduduk terbanyak dengan usia bekerja yaitu 30-34 tahun dengan prosentase 10,55 % dan penduduk yang berusia 25-29 tahun dengan prosentase 10,47 % dan terendah penduduk berusia lanjut yaitu 60-64 tahun dengan prosentase 3,27 %. Tabel penduduk berdasarkan struktur usia di Kelurahan Sukorame dapat dilihat pada tabel 4.17

Tabel 4.17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia di Kelurahan Sukorame

No	Umur	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
1	0-4	352	5.88
2	5-9	390	6.51
3	10-14	444	7.41
4	15-19	452	7.55
5	20-24	610	10.18
6	25-29	627	10.47
7	30-34	632	10.55

No	Umur	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)
8	35-39	488	8.15
9	40-44	445	7.43
10	45-49	394	6.58
11	50-54	294	4.91
12	55-59	280	4.67
13	60-64	196	3.27
14	>65	386	6.44
Jumlah		5990	100

Sumber: Monografi Kelurahan Sukorame Tahun 2012

- Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh penduduk Kelurahan Sukorame antara Tidak/Belum sekolah hingga S3 dengan jumlah terbanyak pendidikan terakhir adalah SMA yaitu dengan jumlah penduduk 1784 jiwa atau 29,78%. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel 4.18

Tabel 4.18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Penduduk Kelurahan Sukorame

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tidak / Belum Sekolah	775	12.94
2	Tamat SD/ Sederajat	664	11.09
3	Belum tamat SD/ Sederajat	981	16.38
4	Tamat SLTP/ Sederajat	1013	16.91
5	Tamat SMA / Sederajat	1784	29.78
6	Tamat Diploma I/ II	107	1.786
7	Tamat Akademi/ Diploma III	162	2.705
8	Tamat Sarjana Strata I	460	7.679
9	Tamat Sarjana Strata II	42	0.701
10	Tamat Sarjana Strata III	2	0.033
Jumlah		5990	100

Sumber: Monografi Kelurahan Sukorame Tahun 2012

Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan struktur usia, jumlah penduduk di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame memiliki jumlah penduduk paling besar adalah dengan usia 10-34 tahun yang tergolong dalam kelompok penduduk dengan usia produktif. Penduduk dengan usia produktif inilah yang merupakan potensi. Banyaknya jumlah penduduk yang produktif dikatakan suatu potensi karena penduduk dengan usia tersebut tergolong dalam usia kerja, daya tangkap yang tinggi terhadap suatu ilmu pengetahuan, serta memiliki tenaga yang maksimal dibandingkan dengan penduduk usia lain

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh masyarakat pada kedua kelurahan memiliki prosentase pendidikan tertinggi yang sama yaitu pendidikan terakhir SMA. Sedangkan untuk perguruan tinggi merupakan prosentase yang terendah. Pendidikan terakhir masyarakat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Pendidikan terakhir masyarakat dapat digolongkan suatu potensi karena dengan pendidikan terakhir SMA memungkinkan masyarakat untuk mudah memahami suatu ilmu pengetahuan. Namun dari hasil survei didapatkan hasil bahwa masyarakat yang bermata

pencaharian sebagai petani memiliki jenjang pendidikan terakhir tamat SD/ tidak sekolah. Hal ini merupakan suatu masalah, karena petani memiliki pendidikan rendah maka pengetahuan mengenai pengelolaan lahan dan lingkungan menjadi terbatas. Dikhawatirkan masyarakat dapat melakukan suatu kegiatan yang dapat merusak lingkungan.

Tingkat pendidikan masyarakat juga berpengaruh terhadap inovasi pertanian. Saat ini masyarakat masih menggunakan cara pertanian konvensional dengan langsung menjual produk pertaniannya berupa bahan mentah. Padahal terdapat banyak komoditas yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi produk olahan sekaligus dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan nilai jual produk tersebut. Untuk salah satu komoditas yaitu tebu, masyarakat telah bekerjasama dengan pabrik tebu yang ada di Kelurahan Mrican dengan masyarakat sebagai penyedia bahan baku. Berdasarkan struktur umur dan pendidikan Kelurahan Mojooroto dan Kelurahan Sukorame memiliki suatu potensi untuk dikembangkan yaitu jumlah penduduk produktif merupakan jumlah penduduk yang paling banyak. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari pemerintah untuk mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat agar dapat memelihara dan mengelola lingkungannya dengan baik.

4.4.2 Kajian Ekonomi

A. Kelurahan Pojok

- Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

Berdasarkan mata pencahariannya penduduk Kelurahan Pojok dibedakan menjadi 14 kelompok, jumlah penduduk terbanyak adalah penduduk yang belum bekerja yaitu 2149 jiwa atau 24,52 % dan terendah adalah tokoh agama yaitu 6 jiwa atau 0,07 %. (Tabel 4.19)

Tabel 4.19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kelurahan Pojok

No	Mata pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1	Belum Bekerja	2149	24.52
2	Ibu Rumah Tangga	1163	13.27
3	Pelajar/ Mahasiswa	1602	18.28
4	Pensiunan	107	1.22
5	Pemerintah/ PNS	275	3.14
6	TNI/Polri	80	0.91
7	Wiraswasta/ Pedagang	784	8.95
8	Petani/Peternak/Nelayan	199	2.27
9	Karyawan BUMN/ Swasta	1072	12.23
10	Buruh	649	7.41
11	Tokoh agama	6	0.07
12	Tenaga Ahli	179	2.04
13	Kesehatan	14	0.16
14	Jasa	484	5.52
Jumlah		8763	100

Sumber: Monografi Kelurahan Pojok Tahun 2012

B. Kelurahan Sukorame

- Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

Berdasarkan mata pencahariannya penduduk Kelurahan Sukorame dibedakan menjadi 14 kelompok, jumlah penduduk terbanyak adalah jumlah penduduk yang belum bekerja yaitu 1346 jiwa atau 22,47 % dan terendah adalah tokoh agama yaitu 3 jiwa atau 0,05% . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.20

Tabel 4.20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kelurahan Sukorame

No	Mata pencaharian	Jumlah	Prosentase (%)
1	Belum Bekerja	1346	22.47
2	Ibu Rumah Tangga	951	15.88
3	Pelajar/ Mahasiswa	977	16.31
4	Pensiunan	260	4.34
5	Pemerintah/ PNS	221	3.69
6	TNI/Polri	55	0.92
7	Wiraswasta/ Pedagang	687	11.47
8	Petani/Peternak/Nelayan	30	0.50
9	Karyawan BUMN/ Swasta	675	11.27
10	Buruh	212	3.54
11	Tokoh agama	3	0.05
12	Tenaga Ahli	142	2.37
13	Kesehatan	21	0.35
14	Jasa	410	6.84
Jumlah		5990	100

Sumber: Monografi Kelurahan Sukorame Tahun 2012

Pada Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame penduduk dengan jumlah terbesar adalah belum bekerja. Sedangkan untuk guna lahan terbesar di sekitar hutan lindung adalah pertanian. Oleh karena itu penduduk dengan mata pencaharian petani memiliki peran yang besar dalam mengembangkan daerah sekitar hutan lindung. Namun penduduk dengan mata pencaharian petani di Kelurahan Pojok maupun Kelurahan Sukorame tidaklah memiliki prosentase yang besar, bahkan tidak mencapai setengah jumlah penduduk yang ada di kelurahan tersebut. Hal ini dapat menjadi masalah karena mata pencaharian penduduk belum dapat mendukung guna lahan pertanian. Namun penduduk yang belum bekerja masih memiliki potensi untuk mencari pekerjaan. Jika pertanian memiliki peluang yang tinggi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, maka masyarakat tentu akan tertarik bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu inovasi hasil pertanian diperlukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Potensi pemberdayaan masyarakat perlu diperhaikan, adanya penyuluhan dari pemerintah perlu didukung dengan inisiatif masyarakat untuk berkembang selain itu diharapkan masyarakat yang belum bekerja semakin berkurang. Akan lebih baik jika penduduk yang belum bekerja akan semakin banyak yang bertani.

Masyarakat yang ada di sekitar hutan lindung belum memahami fungsi suatu kawasan. Hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang memiliki lahan pertanian di daerah tersebut menjual lahan pertaniannya untuk perumahan baru atau untuk guna lahan terbangun lainnya. Hal ini dapat mengurangi luas lahan tidak terbangun yang ada di daerah yang berbatasan dengan hutan lindung dan akan lebih membayakan bagi hutan lindung jika lahan terbangun mengarah ke daerah hutan lindung.

4.4.3 Kajian Kelembagaan

Kelembagaan yang dibahas adalah kelembagaan pada daerah yang berbatasan langsung secara administratif dengan hutan lindung yaitu Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame. Karakteristik kelembagaan berkaitan dengan pengelolaan lahan pada daerah penyangga hutan lindung selain dari pemerintah setempat dibedakan menjadi dua hal yaitu kelembagaan bidang sosial kemasyarakatan dan bidang pertanian

1. Kelembagaan bidang sosial masyarakat

a. Jenis lembaga

Lembaga di bidang sosial masyarakat di kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame adalah karang taruna

b. Kegiatan lembaga

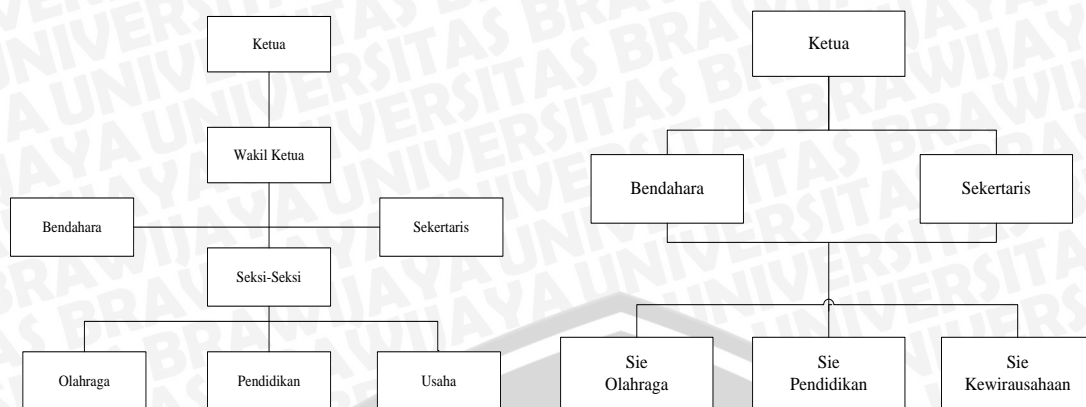
Karang taruna yang ada di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame belum memiliki kegiatan yang secara rutin dilakukan di masyarakat, Hal ini dikarenakan lembaga ini baru terbentuk 2 tahun yang lalu yaitu tahun 2010.

c. Tugas

Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

d. Struktur

Struktur organisasi kelembagaan ini dimulai dari ketua hingga stafnya, namun pada Karang Taruna tidak ada yang membina/ mengarahkan.



Gambar 4.10 Struktur Organisasi Karang Taruna Kelurahan Pojok (Kiri) dan Kelurahan Sukorame (Kanan)

Sumber: Hasil Survey primer, 2011

2. Kelembagaan bidang pertanian

a. Jenis Lembaga

Lembaga pertanian di bidang pertanian yang ada di Kelurahan Pojok adalah Kelompok tani dan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. Sedangkan untuk Kelurahan Sukorame hanya kelompok tani saja.

b. Kegiatan lembaga

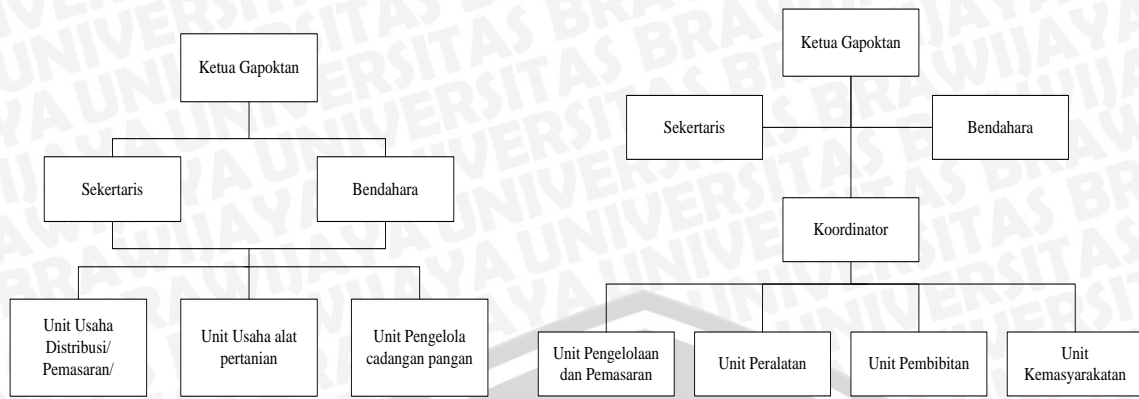
Lembaga masyarakat yang ada di Kelurahan Pojok memiliki kegiatan rutin yang dilakukan setiap 1 bulan sekali yaitu penyuluhan pertanian yang berlokasi di Gunung Klotok. Sedangkan untuk kegiatan kelompok tani di Kedua kelurahan itu adalah belum memiliki kegiatan rutin, kelompok tani hanya digunakan untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah atau sebagai formalitas saja.

3. Tugas

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha.

4. Struktur

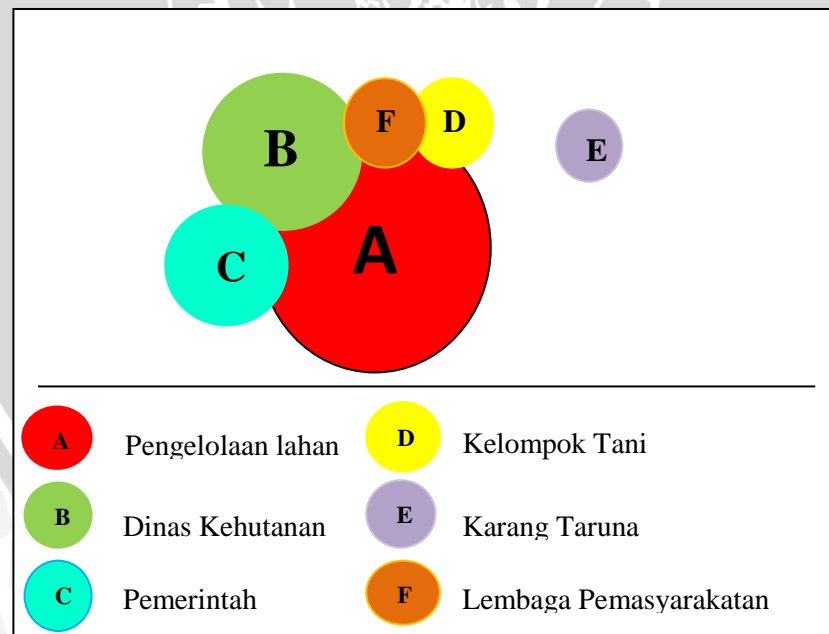
Struktur organisasi kelembagaan ini dimulai dari ketua hingga unit usahanya, namun pada Kelompok Tani tidak ada yang membina/ mengarahkan.



Gambar 4.11 Struktur Kelembagaan Pertanian Kelurahan Pojok (Kiri) dan Kelurahan Sukorame (Kanan)

Sumber: Monografi Kelurahan Pojok Tahun 2012

Lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan lahan pertanian selain dari pemerintah juga ada lembaga pemasyarakatan yang bergerak di bidang pertanian dan lembaga tani. Keberadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sebagai jembatan antara pemerintah dan kelompok tani dalam hal penyuluhan. Hal ini dikarenakan tingginya usaha pemerintah dalam untuk melindungi hutan lindung. Sehingga pemerintah dapat memonitoring aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan daerah sekitar hutan lindung. Hubungan dari masing- masing lembaga yang ada di kelurahan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.12



Gambar 4.12 Diagram Kelembagaan dalam Pengelolaan Lahan Daerah yang Berbatasan dengan Hutan Lindung

Sumber: Survey Primer Tahun 2011

Hubungan antara masing-masing lembaga yang ada di daerah tersebut dalam pengelolaan lahan di daerah penyangga yang berperan paling besar adalah dinas kehutanan. Dinas kehutanan bersama pemerintah bekerjasama dalam usaha pengelolaan lahan. Sedangkan kelompok tani dan dinas kehutanan dihubungkan (dijembatani) oleh lembaga pemasyarakatan. Selain itu lembaga lain yaitu karang taruna yang baru terbentuk dalam 2 tahun terakhir belum memiliki kegiatan rutin, lembaga ini tidak ada kaitan khusus dengan lembaga lain ataupun dalam usaha untuk mengelola hutan lindung.

Hubungan dari masing-masing lembaga yang ada masih sangat terbatas. Dinas Kehutanan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan hutan lindung secara khusus mengawasi kondisi hutan lindung. Petugas lapangan (dinas kehutanan) bersama pemerintah kelurahan secara berkala memonitor batas hutan lindung dengan sawah yang digunakan sebagai tempat penyuluhan yang berbatasan langsung dengan hutan lindung. Sedangkan hubungan antara pemerintah setempat (kelurahan) dengan kelompok tani tidak berhubungan secara langsung. Lembaga pemasyarakatan secara khusus dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan penyuluhan terhadap petani kelompok tani mengenai pengelolaan lahan untuk kemudian diterapkan dalam pengelolaan lahan. Setelah itu pengawasan diserahkan kepada pemerintah kelurahan. Oleh karena itu pemerintah kelurahan tidak berhubungan secara langsung dengan lembaga tani. Lokasi lembaga pemasyarakatan terletak di sebelah timur kawasan pendidikan. (gambar 4.13)



Gambar 4.13 Lembaga Pemasyarakatan di Bidang Pertanian

Sumber: Survey Primer Tahun 2011

Karang taruna yang baru saja terbentuk jadi belum memiliki kegiatan khusus yang melibatkan masyarakat, sehingga tidak memiliki kaitan dengan lembaga lainnya. Seharusnya karang taruna dapat menjadi sarana pembinaan masyarakat khususnya pemuda untuk pengarahan pemanfaatan lahan yang benar. Selain itu juga dapat menjadi media untuk pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya usia muda yang mampu menciptakan inovasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa mengurangi nilai ekologis dari lingkungan.

4.4.4 Kajian Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat, terlebih dahulu mengetahui karakteristik sosial budaya dan aktivitas masyarakat sehari-hari masyarakat yang ada di sekitar hutan lindung untuk kemudian dapat mengetahui pentingnya partisipasi masyarakat hingga akhirnya mengetahui tingkat partisipasi masyarakat.

A. Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat

Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame merupakan kelurahan yang masih mempertahankan kesenian daerah, terbukti dengan adanya beberapa paguyuban jaranan di kelurahan tersebut. Adanya kawasan wisata Goa Selomangleng yang merupakan tarikan tertinggi masyarakat merupakan suatu kesempatan bagi masyarakat di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame untuk memperkenalkan kebudayaan Jawa berupa seni jaranan. Setiap akhir pekan (minggu), kawasan wisata ramai dikunjungi masyarakat. Pada saat itulah kesenian daerah ditampilkan, dan menjadi tambahan daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang hadir.

Kondisi sosial budaya masyarakat Kecamatan Mojojoto Kota Kediri banyak dipengaruhi oleh budaya Jawa dan Islam. Kebudayaan Jawa dapat dilihat dari masih banyaknya atap bangunan yang memiliki ciri khas atap bangunan Jawa. Selain pada atap bangunan, ciri khas budaya Jawa juga banyak ditemui pada pintu gerbang bangunan, khususnya bangunan perkantoran dan pendidikan. Budaya Jawa tidak hanya dapat ditemui pada bangunan-bangunan perkantoran dan pendidikan, tetapi juga pada bangunan-bangunan peribadatan seperti masjid dan pura.

B. Aktivitas Sehari-hari Masyarakat

Aktivitas masyarakat Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame dipengaruhi oleh guna lahan berupa kawasan pendidikan berupa perguruan tinggi dan SMA, kawasan militer, kawasan wisata serta perdagangan dan jasa. Kondisi guna lahan yang bervariasi menimbulkan tarikan masyarakat yang berasal dari daerah sekitar. Selain guna lahan yang bervariasi daerah ini didukung oleh aksesibilitas yang memadai, sehingga aktivitas masyarakat di kedua kelurahan berjalan dengan lancar. Guna lahan yang bervariasi dan aksesibilitas yang memadai ini dimanfaatkan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah dalam menjaga hutan lindung diwakili oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Aktivitas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani cukup terstruktur, hal ini dipengaruhi adanya kerjasama dari pemerintah dengan cara pengembangan pengelolaan pertanian yang

berlokasi di tepi hutan. Masyarakat sangat antusias dalam kegiatan ini, karena dengan adanya kegiatan ini pengetahuan masyarakat meningkat. Masyarakat sering mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapatnya mengenai pengelolaan pertanian yang baik. Pihak pemerintah dalam hal ini menyambut antusias masyarakat dengan menampung segala pendapat yang diajukan masyarakat untuk dipertimbangkan. Sedangkan untuk penduduk yang bermata pencaharian selain petani akan mengikuti kegiatan baik musyawarah maupun usaha pemerintah dalam menjaga lingkungan apabila masyarakat memiliki waktu luang diluar pekerjaannya. Aktivitas sehari-hari masyarakat untuk lebih jelasnya, sebagai berikut:

- Mengikuti penyuluhan pemerintah : Penyuluhan yang diadakan pemerintah setiap satu bulan sekali ini sangat menarik perhatian masyarakat, menurut masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut hasil pertaniannya meningkat setelah mengikuti pengelolaan pertanian yang diajarkan.
- Musyawarah (hasil penyuluhan) : Setelah penyuluhan dilakukan masyarakat dengan inisiatifnya sendiri membentuk suatu kelompok musyawarah untuk membahas masalah yang dihadapi selama penyuluhan. Masalah yang tidak dimengerti kemudian ditampung untuk selanjutnya ditanyakan kepada pihak yang lebih ahli, dalam hal ini pemerintah.
- Melaporkan hasil pengelolaan pertanian : Setiap waktu panen tiba, masyarakat diwajibkan oleh pemerintah untuk melaporkan hasil pertanian dari metode pengelolaan yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengetahui metode pengelolaan terbaik yang dapat diterapkan.
- Mengikuti evaluasi dari pemerintah : Pemerintah melakukan evaluasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai hasil pertanian, kemudian dilakukan analisis oleh pemerintah, untuk selanjutnya diungkapkan dalam pertemuan evaluasi. Pada aktivitas inilah masyarakat mengungkapkan masalah yang ditampung dalam musyawarah (hasil penyuluhan).

C. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat berkaitan dengan segala kegiatan yang dilakukan masyarakat yang berada pada daerah yang berbatasan langsung dengan hutan lindung secara administratif yaitu masyarakat Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak hutan lindung yaitu penebangan liar dan pembukaan hutan yang dialih fungsikan masyarakat sebagai sawah

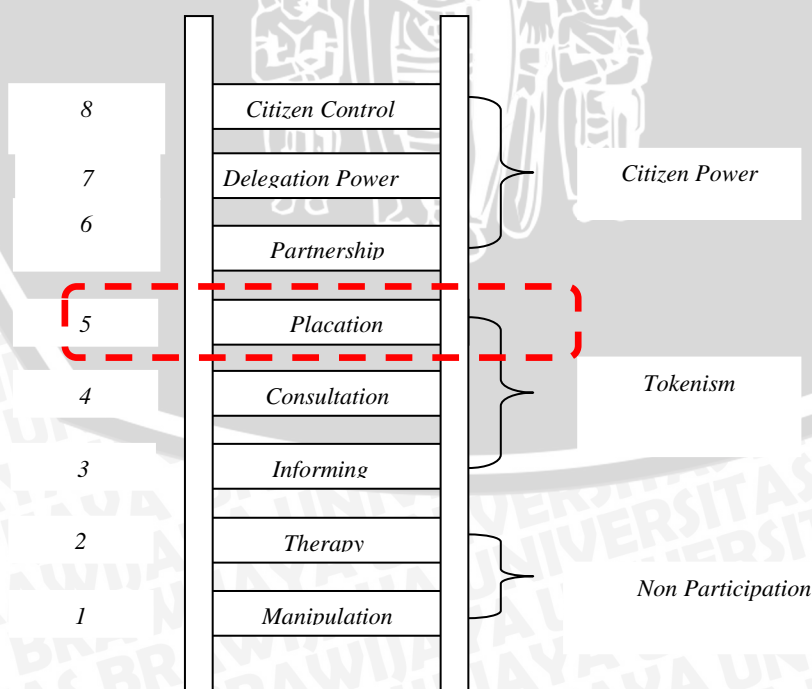
dan perkebunan untuk menunjang perekonomiannya. Pembahasan mengenai partisipasi masyarakat yang dikelompokkan menjadi dua hal yaitu bentuk dan tingkat partisipasinya yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar hutan lindung.

➤ Bentuk partisipasi masyarakat

Ditinjau dari aktivitas sehari-hari masyarakat dalam menjaga hutan lindung yaitu dengan mengikuti penyuluhan, musyawarah, melaporkan hasil pengelolaan pertanian dan mengikuti evaluasi dari pemerintah. Masyarakat telah membuktikan partisipasinya dalam kegiatan yang diadakan pemerintah. Aktivitas masyarakat tersebutlah yang pada akhirnya menjadi dasar dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat akan dijelaskan lebih rinci pada tahap selanjutnya.

➤ Tingkat partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, terhadap masyarakat mengenai aktivitasnya dalam mendukung pemerintah untuk menjaga hutan lindung dan konservasi daerah penyangga. Jika dilihat dalam tangga partisipasi, maka partisipasi masyarakat berada pada tangga ke kelima yaitu *placation*. Masyarakat sebagai *advisor* dan mulai ikut merencanakan secara terus-menerus, akan tetapi masukan mereka ditampung dulu kemudian dinilai kelayakan dan kesahan dari masukan tersebut. Masyarakat tidak memiliki keputusan untuk mengambil keputusan perencanaan. Jika digambarkan dalam tingkatan partisipasi dapat dilihat pada gambar 4.14



Gambar 4.14 Tangga Partisipasi Kelurahan Sukorame dan Kelurahan Pojok

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat, sebanyak 46 orang atau sebanyak 63,89% menyatakan keikutsertaannya atau partisipasinya sudah sampai memberikan pendapat/ masukan terhadap suatu kegiatan. Sisanya sebanyak 12 orang atau 16,67% hanya sebagai pendengar dalam kegiatan musyawarah dan 14 orang atau 19,44% menyatakan keikutsertaannya hanya dalam bertanya mengenai kegiatan yang diadakan oleh pemerintah. Selanjutnya dari hasil wawancara terhadap pemerintah mengenai partisipasi masyarakat di sekitar hutan lindung, pemerintah menyatakan pendapat yang diutarakan oleh masyarakat dalam kegiatan musyawarah ditampung untuk diuji/ dipertimbangkan kelayakannya dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini masyarakat tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu dari kegiatan/ aktivitas yang dilakukan masyarakat serta tanggapan dari pemerintah, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berada dalam tangga partisipasi kelima.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu potensi dikarenakan tingkat partisipasinya yang berada pada tingkat kelima. Jika partisipasi masyarakat terus meningkat, maka masyarakat memiliki peluang untuk mencapai tingkat partisipasi tertinggi yaitu *Citizen Control* dimana posisi masyarakat adalah yang tertinggi. Oleh karena itu penyuluhan pemerintah dipertahankan ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konsevasi daerah penyangga.

4.5 Kemampuan dan Kesesuaian Lahan

Analisa untuk mengetahui daerah penyangga hutan lindung dilakukan berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan No. : 683/Kpts/Um/8/1981. Tiga faktor yang dinilai sebagai penentu kemampuan lahan menurut pedoman SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan No. : 683/Kpts/Um/8/1981, yaitu :

1. Kelerengan lapangan
2. Jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi
3. Intensitas hujan harian rata – rata

Berikut akan dibahas secara terperinci mengenai ketiga faktor tersebut sehingga mendapatkan kemampuan dan kesesuaian lahan di Kecamatan Mojojoto. Selanjutnya akan diketahui daerah yang memiliki kemampuan menjadi fungsi penyangga, fungsi lindung dan fungsi budaya.

A. Kemiringan

Untuk kondisi kemiringan lahan Kecamatan Mojojoto didominasi kemiringan datar 0-8% sehingga cocok untuk dimanfaatkan sebagai lahan sawah dan permukiman.

Penetapan kategori kemiringan tanah dengan klasifikasi datar (0-8%), landai (8-15%), agak curam (15-25%), curam (25-40%), dan sangat curam (>40%) didasarkan pada pedoman SK Menteri Pertanian no. 837/Kpts/Um/11/1980 dan no. 683/Kpts/Um/8/1981. Peta Kemiringan lahan Kecamatan Mojoroto dapat dilihat pada gambar 4.15

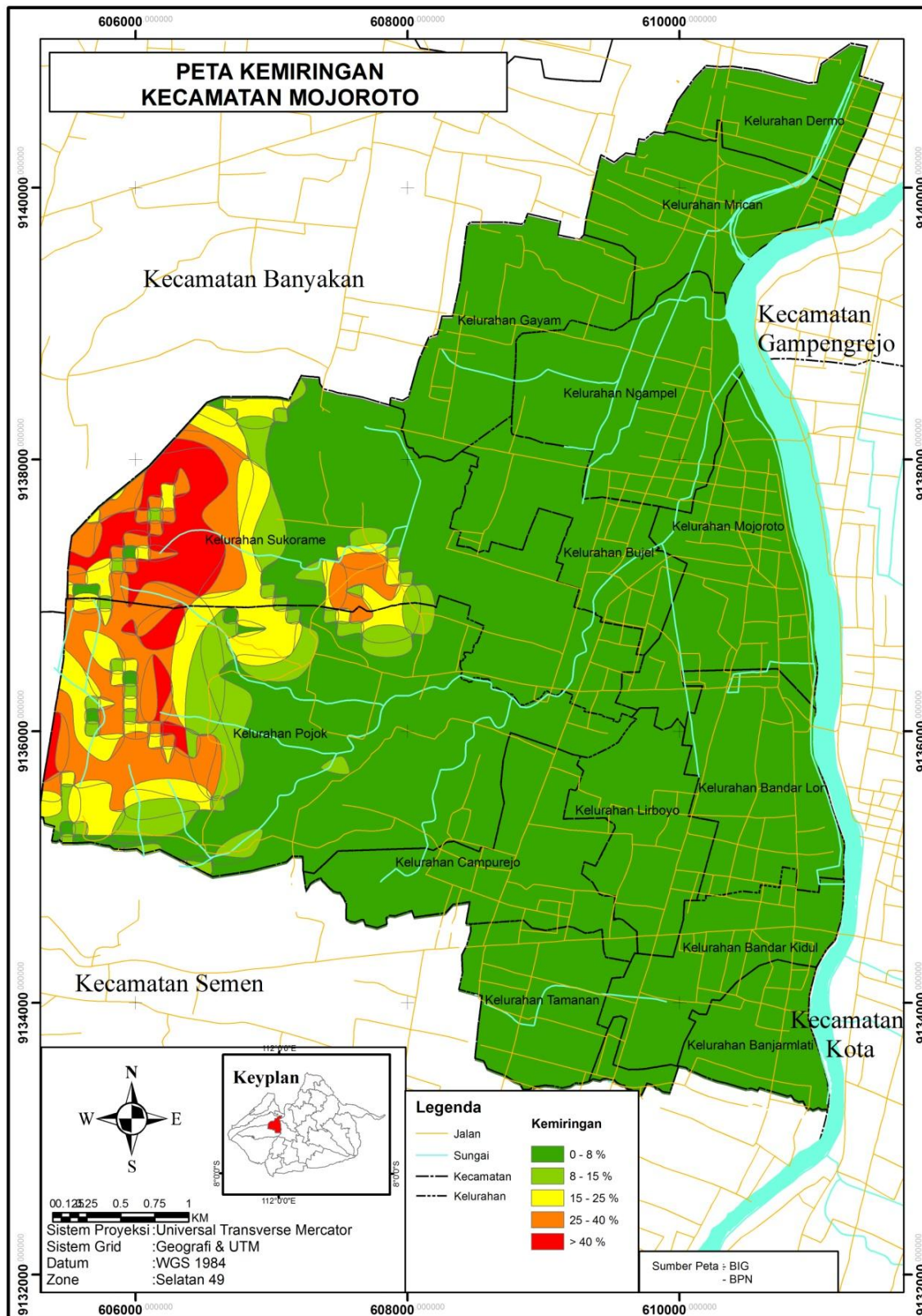
B. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kecamatan Mojoroto terbagi atas tanah alluvial dan andosol. Tanah alluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian dan tergolong dalam jenis tanah yang tidak peka terhadap erosi. Sedangkan andosol adalah salah satu jenis tanah yang relative subur namun memiliki kemampuan menyerap fosfat yang sangat tinggi dan tergolong dalam jenis tanah yang peka terhadap erosi. Jenis tanah yang mendominasi di kecamatan ini adalah alluvial. Peta jenis tanah Kecamatan Mojoroto dapat dilihat pada gambar 4.16

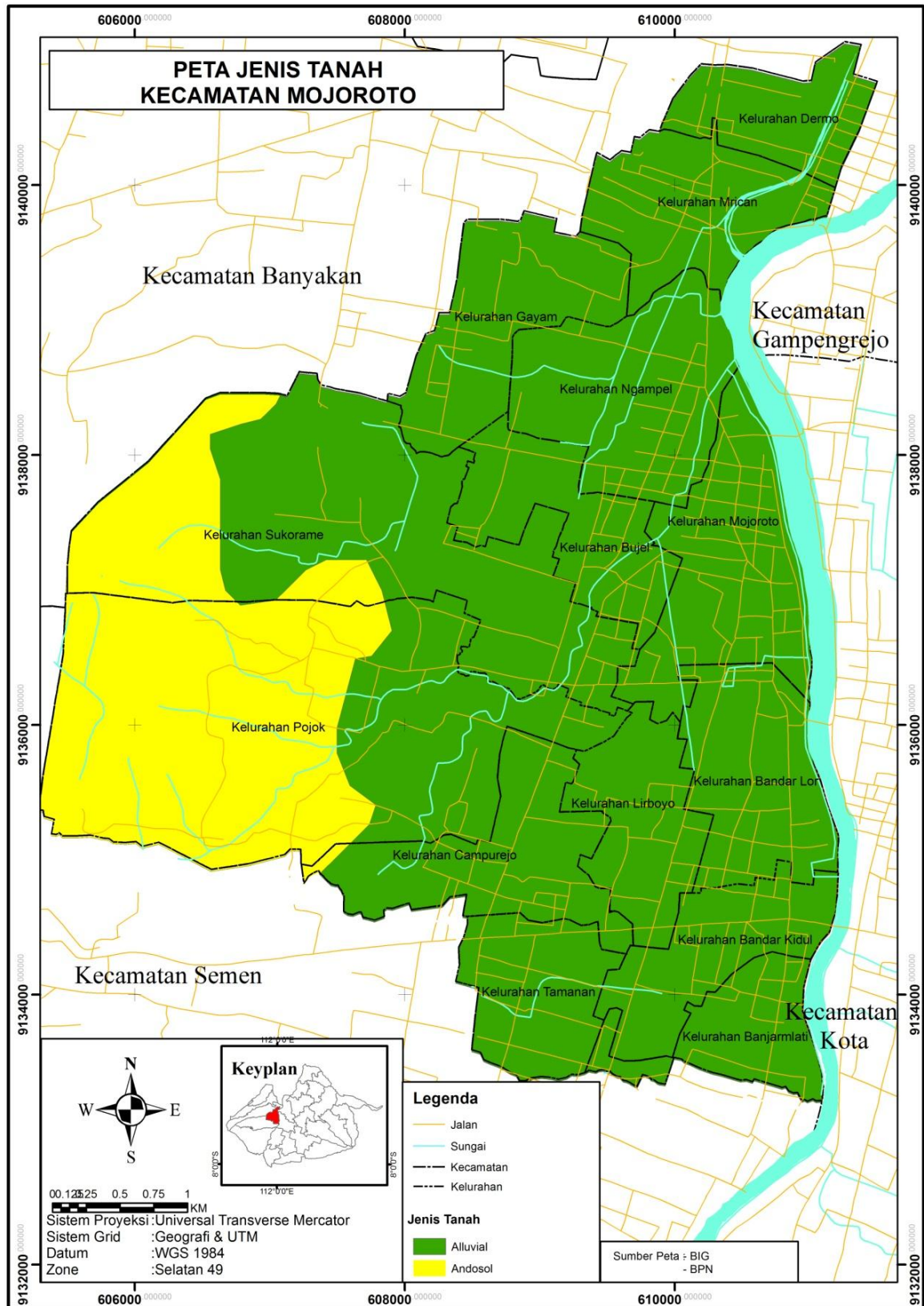
C. Curah Hujan

Rata-rata curah hujan di Kecamatan Mojoroto memiliki kisaran rata-rata 1500 mm - 2500 mm pertahun atau 4,1 mm - 6,85 mm perhari. Menurut pedoman SK Menteri Pertanian no. 837/Kpts/Um/11/1980 dan no. 683/Kpts/Um/8/1981 mengenai klasifikasi intensitas hujan menurut kepekaan erosi maka Kecamatan Mojoroto tergolong pada klasifikasi sangat rendah terhadap ancaman erosi. Peta curah hujan Kecamatan Mojoroto dapat dilihat pada gambar 4.17

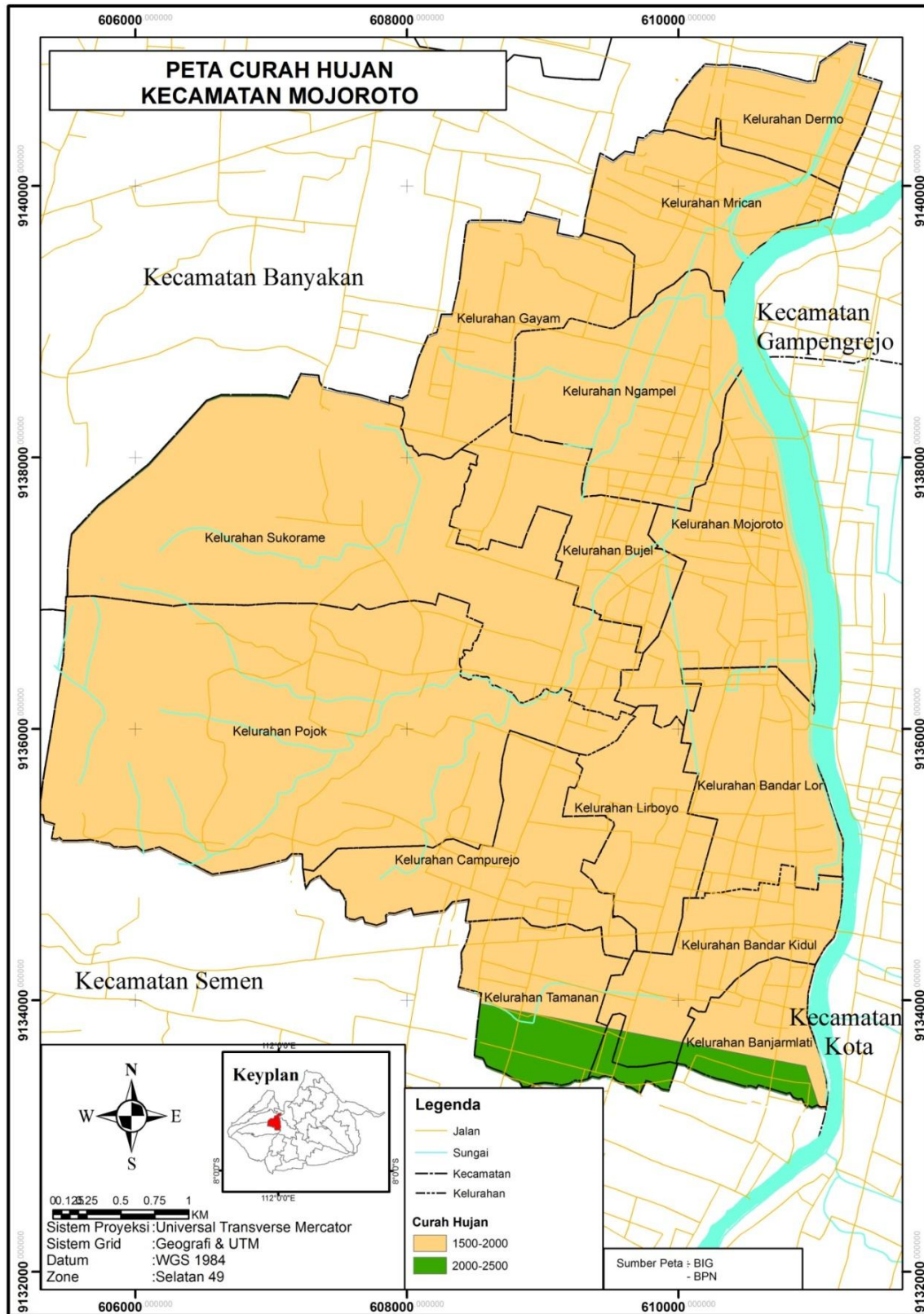
Overlay dari kriteria kemiringan lahan, jenis tanah dan curah hujan dapat dilihat pada gambar 4.18. Namun untuk menentukan kemampuan lahan terdapat kriteria kawasan lindung yang perlu diperhatikan, yaitu kriteria yang menyatakan bahwa untuk kawasan lindung mencakup guna dengan keperluan/kepentingan khusus dan ditetapkan sebagai kawasan lindung. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan hutan yang berada pada daerah Gunung Klotok dan Gunung Maskumambang adalah daerah lindung karena merupakan daerah perlindungan Sumber Daya Alam dan terletak pada kemiringan rawan bencana. Selain itu untuk luasan daerah hutan lindung juga telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu sempadan mata air dan sempadan sungai juga merupakan kawasan lindung. Namun pada hutan lindung yang masuk administrasi Kecamatan Mojoroto tidak terdapat mata air. Jadi kawasan lindung yang menjadi pertimbangan kemampuan lahan adalah hutan lindung dan sempadan sungai. (gambar 4. 19)



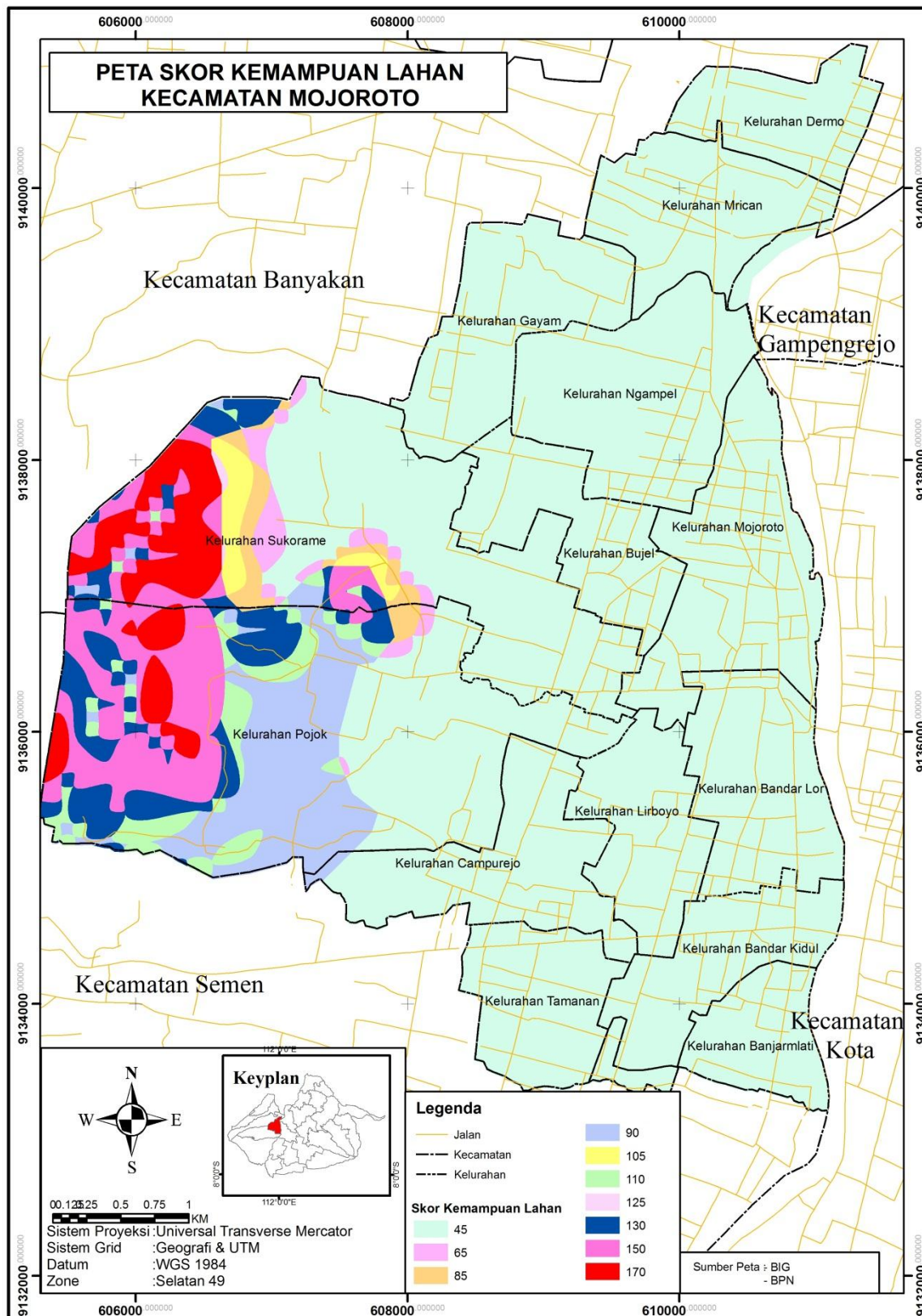
Gambar 4.15 Peta Kemiringan Lahan Kecamatan Mojoroto



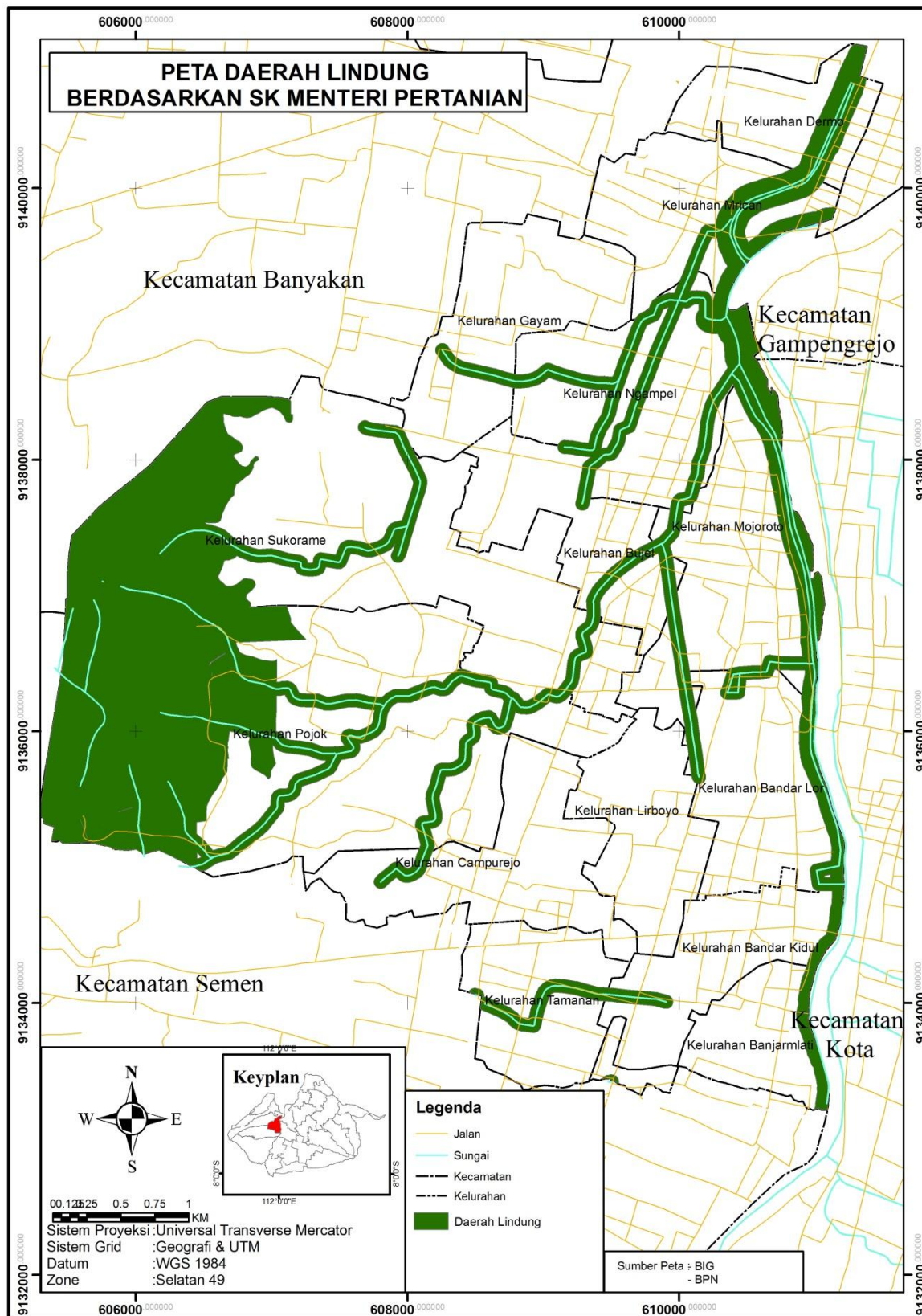
Gambar 4.16 Peta Jenis Tanah Kecamatan Mojoroto



Gambar 4.17 Peta Curah Hujan Kecamatan Mojoroto



Gambar 4.18 Peta Skor Kemampuan Lahan Tanpa Penetapan Kawasan Lindung



Gambar 4.19 Peta Daerah Lindung Kecamatan Mojoroto

4.5.1 Kemampuan Lahan

Kemampuan Lahan Kecamatan Mojojoto dinilai berdasarkan SK Menteri Pertanian no. 837/Kpts/Um/11/1980 dan no. 683/Kpts/Um/8/1981 dengan melihat tingkat kepekaan kemiringan, curah hujan, dan jenis tanah terhadap erosi. Dari penilaian tersebut didapatkan skor yang selanjutnya digolongkan apakah lahan tersebut tergolong daerah lindung, penyangga, tanaman tahunan, dan tanaman semusim. Untuk curah hujan Kecamatan Mojojoto berkisar 1500mm – 2500 mm pertahun atau 4,6mm – 6,5mm perhari dan tergolong klasifikasi sangat rendah sehingga diberi skor 10. Untuk klasifikasi dan skor kemiringan dan jenis tanah akan di jelaskan pada tabel 4.21 dan tabel 4.22. Selain itu, untuk menentukan daerah penyangga diperlukan *buffer* hutan yaitu sebesar 500 meter dari batas terluar hutan (berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No:P.14/ Menhut-II/2013)

Tabel 4.21 Klasifikasi Kelerengan Kecamatan Mojojoto

Kelas	Kelerengan (%)	Klasifikasi	Nilai skor
I	0 - 8	Datar	20
II	8 - 15	Landai	40
III	15 - 25	Agak Curam	60
IV	25 - 40	Curam	80
V	> 40	Sangat Curam	100

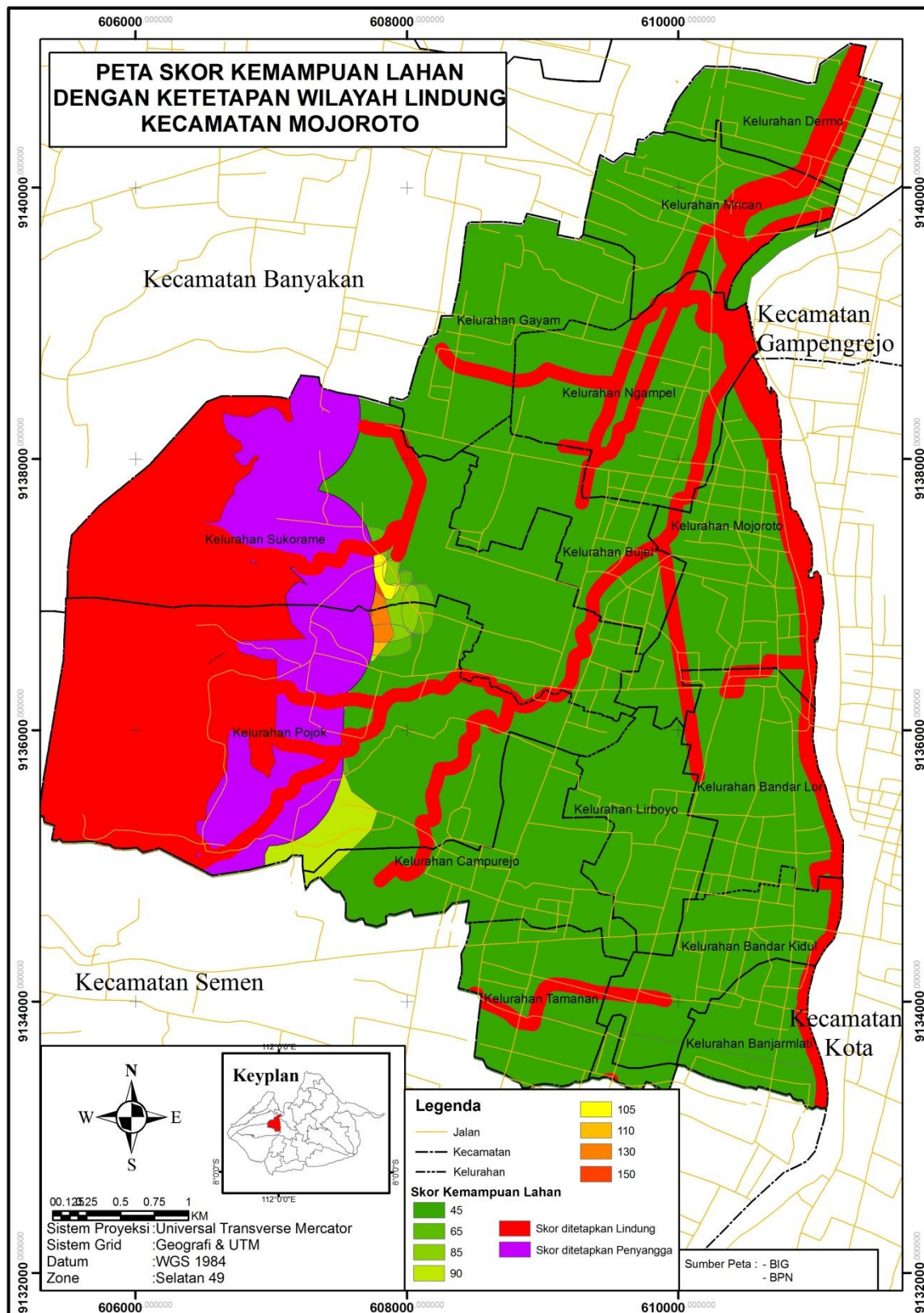
Sumber: SK Menteri Pertanian no. 837/Kpts/Um/11/1980 dan no. 683/Kpts/Um/8/1981

Tabel 4.22 Jenis Tanah Kecamatan Mojojoto

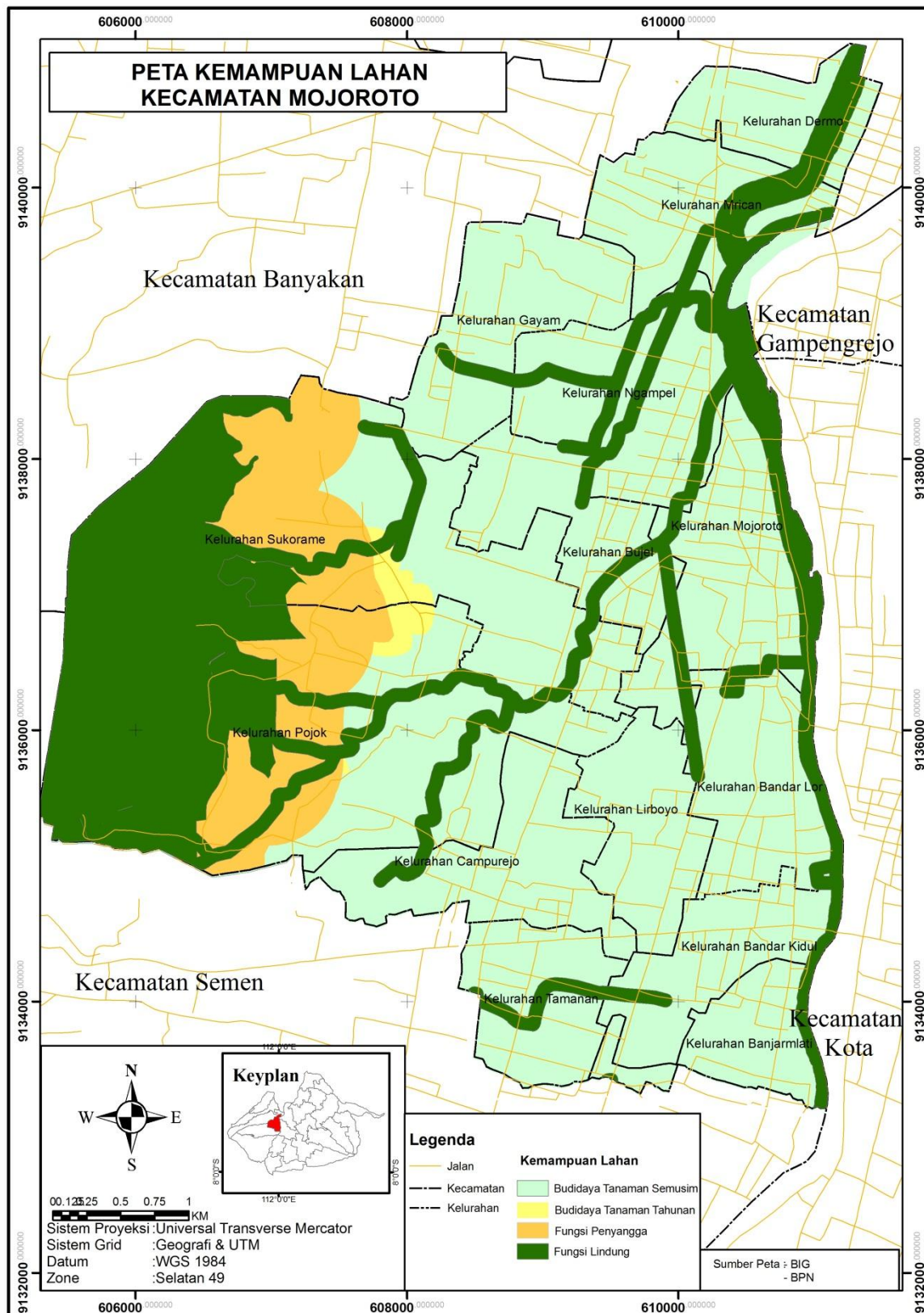
Kelas	Jenis Tanah	Klasifikasi	Nilai skor
I	Alluvial	Tidak Peka	15
IV	Andosol	Peka	60

Sumber: SK Menteri Pertanian no. 837/Kpts/Um/11/1980 dan no. 683/Kpts/Um/8/1981

Pada gambar 4.20 adalah peta yang menunjukkan skor dari tiap-tiap variabel beserta penggolongan yang menyatakan kemampuan lahan di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dan telah ditambah dengan *buffer* hutan lindung (500 m). Sedangkan pada gambar 4.21 adalah peta kemampuan lahan Kecamatan Mojojoto Kota Kediri berdasarkan hasil skoring.



Gambar 4.20 Peta Skor Kemampuan Lahan Kecamatan Mojoroto



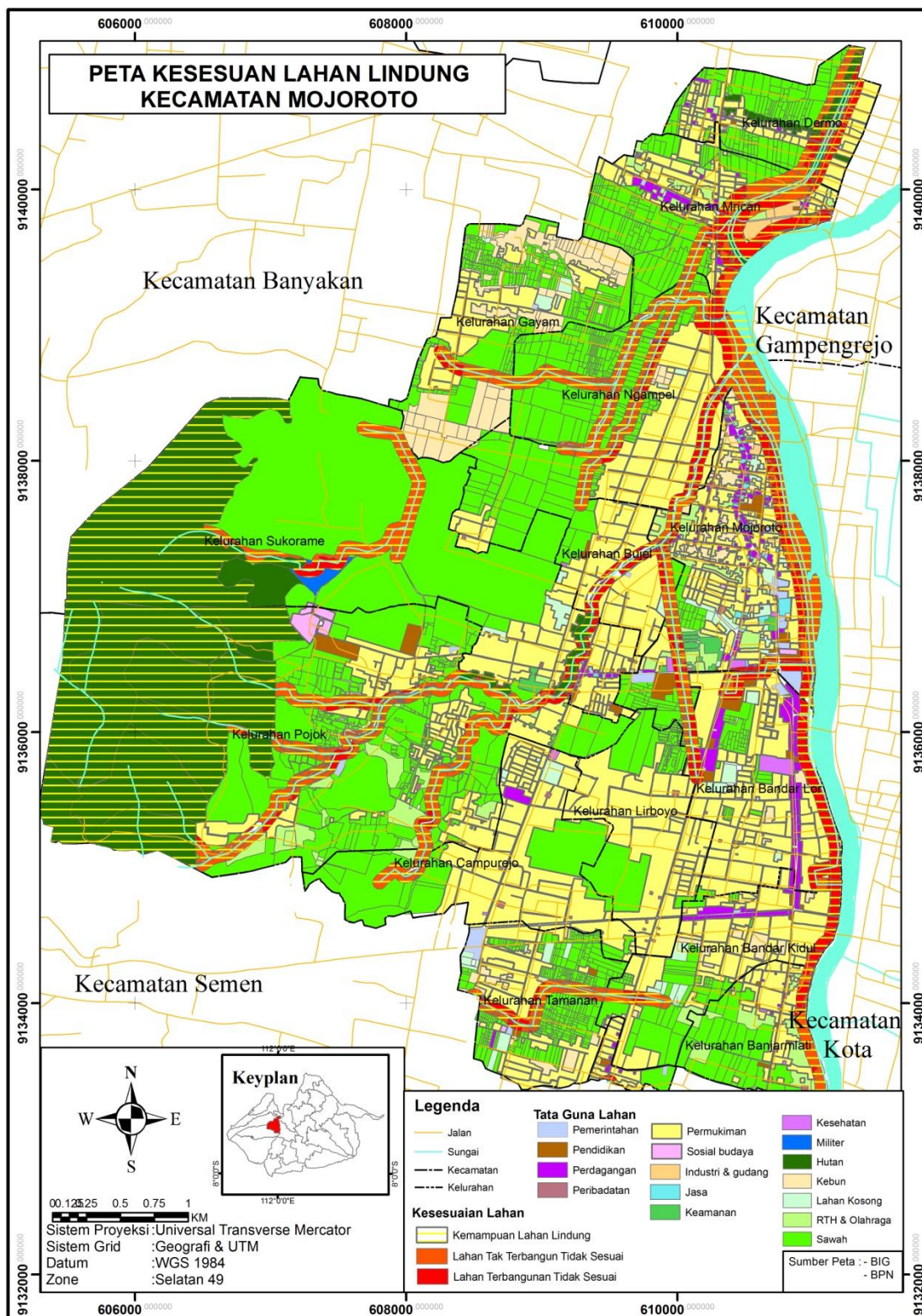
Gambar 4.21 Peta Analisa Kemampuan Lahan Kecamatan Mojoroto

Dari peta kemampuan lahan dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Mojoroto didominasi oleh kemampuan lahan budidaya tanaman semusim dan fungsi lindung. Selain itu terdapat fungsi kawasan budidaya tanaman tahunan dan fungsi penyangga. Kawasan fungsi penyangga menurut SK Menteri Pertanian no. 837/Kpts/Um/11/1980 dan no. 683/Kpts/Um/8/1981 nilai skor kemampuan lahannya sebesar 125 -174 dan telah di *buffer* sebesar 500 meter berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P 14/menhut-II/2013. Selain itu kawasan fungsi penyangga adalah suatu wilayah yang dapat berfungsi lindung dan berfungsi budidaya, letaknya diantara kawasan fungsi lindung dan kawasan fungsi budidaya seperti hutan produksi terbatas, perkebunan (tanaman keras), kebun campur dan lainnya yang sejenis.

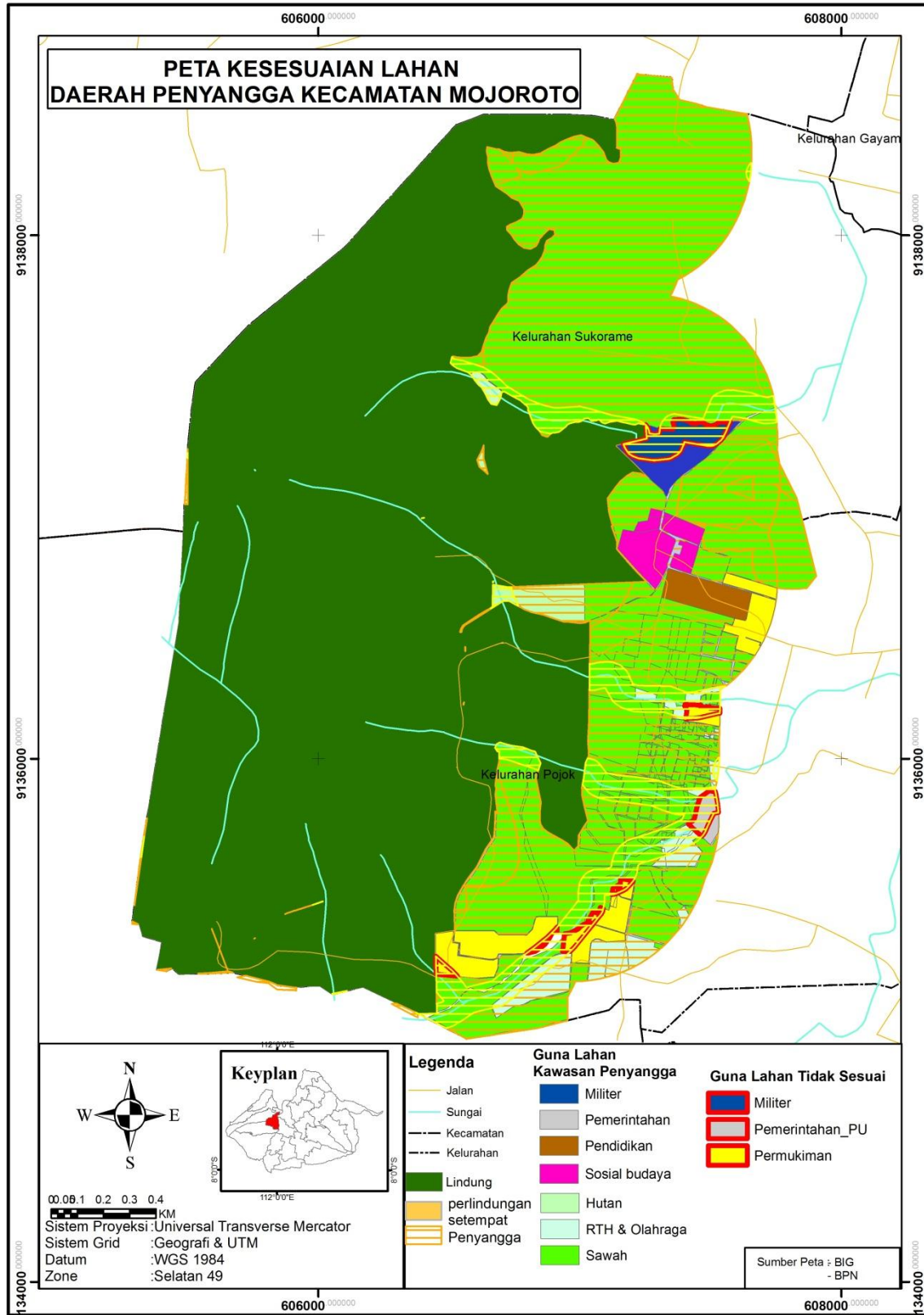
Berdasarkan kemampuan lahan, kawasan dengan fungsi lindung memiliki luas 7.563.320 m², daerah penyangga seluas 1.974.450 m², tanaman tahunan 942.777 m², tanaman musiman seluas 17.301.373 m². Kawasan penyangga mencakup guna lahan hutan produksi, persawahan, kawasan militer, pemerintahan, pendidikan, permukiman, RTH dan Olahraga serta sosial budaya yaitu museum. Pada Kawasan budidaya terdapat kawasan perlindungan setempat yang merupakan sempadan sungai yaitu 100 meter dari sungai.

4.5.2 Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan Kecamatan Mojoroto dapat dilihat dengan membandingkan kemampuan lahan dengan kondisi penggunaan lahan eksisting sehingga dapat memunculkan kesimpulan penggunaan lahan eksisting yang sesuai dan yang belum sesuai. Kesesuaian lahan di Kecamatan Mojoroto untuk tiap guna lahan yang ada di kecamatan tersebut dapat dilihat pada gambar 4.22



Gambar 4.22 Peta Analisis Kesesuaian lahan di Kecamatan Mojoroto



Gambar 4.23 Peta Analisis Kesesuaian lahan di Daerah Penyangga



Dari kesesuaian lahan penggunaan lahan yang tidak sesuai pada daerah penyangga seluas 62.822 m² yaitu penggunaan lahan militer, pemerintahan, sosial budaya. Namun ada beberapa guna lahan yang melanggar fungsi daerahnya yaitu pada daerah perlindungan setempat yang berupa guna lahan permukiman 18.465 m² seluas, pemerintahan seluas 10.456 m² dan guna lahan militer seluas 33.950 m². Seharusnya kawasan perlindungan setempat termasuk dalam fungsi lindung yang bebas lahan terbangun. Penggunaan lahan yang tidak seharusnya berada pada kawasan perlindungan setempat dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan seperti kerusakan lingkungan, tanah longsor dan bencana alam lainnya. Hal tersebut yang menjadi penyebab berkurangnya daerah resapan air sehingga air yang seharusnya meresap ke dalam tanah dapat melimpas ke daerah yang lebih rendah. Oleh karena itu dibutuhkan konservasi daerah penyangga sebagai perlindungan terhadap hutan lindung.

4.6 Penentuan Strategi Konservasi Daerah Penyangga

Pada tahapan ini dilakukan wawancara terhadap informan yaitu *stakeholder* yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang kehutanan dan daerah penyangga beserta kebijakannya. Pendapat dari *stakeholder* ini digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi konservasi daerah penyangga. Selain itu pendapat *stakeholder* juga digunakan untuk mengetahui potensi, masalah, peluang dan ancaman terkait dengan strategi konservasi daerah penyangga. Wawancara terhadap *stakeholder* menggunakan sub variabel tiap rumusan masalah yang diambil dari jurnal. Sub variabel tersebut antara lain: penggunaan lahan, pengelolaan lahan, kependudukan, pendidikan, partisipasi masyarakat, mata pencaharian, kelembagaan sosial, kelembagaan pertanian, pemberdayaan masyarakat. Hasil identifikasi kata kunci sebagai variabel tambahan yang mempengaruhi strategi konservasi daerah penyangga yang telah diketahui dapat dilihat pada tabel 4.23

Tabel 4.23 Identifikasi variabel baru yang mempengaruhi strategi konservasi daerah Penyangga

Exspert	Teori variabel yang diketahui	Hasil wawancara	Variabel tambahan	Variabel untuk AHP
1. Akademisi Dinas perhutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lahan • Pengelolaan lahan • Kependudukan • Pendidikan • Partisipasi masyarakat 	Penggunaan lahan Jumlah penduduk Partisipasi masyarakat Kebijakan	Jumlah penduduk Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lahan • Pengelolaan lahan • Jumlah penduduk • Partisipasi masyarakat • Mata
2. Akademisi Dinas Perhutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Mata pencaharian • Kelembagaan • Pemberdayaan 	Penggunaan lahan Jumlah penduduk Partisipasi masyarakat Mata pencaharian kelembagaan Kebijakan	Jumlah penduduk Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi masyarakat • Mata

Exspert	Teori variabel yang diketahui	Hasil wawancara	Variabel tambahan	Variabel untuk AHP
3. Ahli Sumber daya Manusia (Bidang Dinas Perhutanan)	masyarakat	Penggunaan lahan Pengelolaan lahan Partisipasi masyarakat Kelembagaan	-	Pencaharian • Kelembagaan • Kebijakan
4. Bapeda Kota Kediri		Penggunaan lahan Pengelolaan lahan Jumlah penduduk Mata pencaharian Kebijakan	Jumlah penduduk Kebijakan	

Reduksi variabel berdasarkan teori dilakukan untuk mendapatkan variabel yang relevan antara teori dan hasil wawancara dengan pihak ahli. Pada tahap ini dilakukan dua kali wawancara terhadap *stakeholder* yaitu identifikasi kata kunci baru selain variabel dari variabel yang telah diketahui. Berdasarkan hasil wawancara diketahui adanya variabel dari teori dapat disederhanakan menjadi satu variabel karena memiliki karakteristik sub variabel yang sama. Sehingga pada akhirnya diketahui variabel yang dapat digunakan untuk analisis AHP. Variabel yang mempengaruhi strategi konservasi daerah penyangga berdasarkan *stakeholder* antara lain variabel penggunaan lahan, pengelolaan lahan, partisipasi masyarakat. Sedangkan untuk kependudukan dan pendidikan dianggap menjadi satu sub variabel yang mempengaruhi yaitu jumlah penduduk dan kelembagaan sosial dan kelembagaan pertanian juga dijadikan satu variabel yaitu kelembagaan serta ada satu variabel tambahan yaitu kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan keempat *stakeholder*, maka variabel yang mempengaruhi strategi konservasi daerah penyangga hutan lindung adalah penggunaan lahan, partisipasi masyarakat, mata pencaharian, ketersediaan lahan, jumlah penduduk, kelembagaan dan kebijakan. Ketujuh kevariabel tersebut digunakan untuk analisis AHP yang dihitung menggunakan *software "Expert Choice 2002 2nd edition"* terhadap pendapat empat orang *stakeholder*.

1. Akademisi Dinas Perhutanan

Berdasarkan hasil AHP, yang mempengaruhi strategi Konservasi daerah penyangga di Kecamatan Mojoroto berdasarkan pendapat ahli 1, prioritas yang utama adalah partisipasi masyarakat. Hasil perbandingan berpasangan strategi konservasi daerah penyangga dapat dilihat pada tabel 4.24. Sedangkan penentuan prioritas dapat dilihat pada tabel 4.25 yang memperlihatkan bahwa *Priority Vector* (VP) paling tinggi adalah partisipasi masyarakat yaitu 0,406

2. Dinas Perhutanan

Berdasarkan hasil AHP, yang mempengaruhi strategi Konservasi daerah penyangga di Kecamatan Mojojoto berdasarkan pendapat ahli 2, prioritas yang utama adalah kebijakan. Hasil perbandingan berpasangan strategi konservasi daerah penyangga dapat dilihat pada tabel 4.24. Sedangkan penentuan prioritas dapat dilihat pada tabel 4.25 yang memperlihatkan bahwa *Priority Vector* (VP) paling tinggi adalah partisipasi masyarakat yaitu 0,476

3. Ahli Sumber daya Manusia (Bidang Dinas Perhutanan)

Berdasarkan hasil AHP, yang mempengaruhi strategi Konservasi daerah penyangga di Kecamatan Mojojoto 3, prioritas yang utama adalah partisipasi masyarakat. Hasil perbandingan berpasangan strategi konservasi daerah penyangga dapat dilihat pada tabel 4.24. Sedangkan penentuan prioritas dapat dilihat pada tabel 4.25 yang memperlihatkan bahwa *Priority Vector* (VP) paling tinggi adalah partisipasi masyarakat yaitu 0,327

4. Bapeda Kota Kediri

Berdasarkan hasil AHP, yang mempengaruhi strategi Konservasi daerah penyangga di Kecamatan Mojojoto berdasarkan pendapat ahli 4, prioritas yang utama adalah kebijakan. Hasil perbandingan berpasangan strategi konservasi daerah penyangga dapat dilihat pada tabel 4.24. Sedangkan penentuan prioritas dapat dilihat pada tabel 4.25 yang memperlihatkan bahwa *Priority Vector* (VP) paling tinggi adalah partisipasi masyarakat yaitu 0,493

Variabel pada dasarnya diambil dari sub variabel yang bersumber dari jurnal, namun pada aplikasinya para stakeholder memilih tujuh variabel yang paling berpengaruh pada konservasi daerah penyangga. Pada awalnya variabel yang digunakan berjumlah 8 variabel. Namun ada variabel lain yang dimasukkan, karena dianggap variabel yang penting.

Berdasarkan pendapat dari keempat *stakeholder* terhadap tujuh variabel yang mempengaruhi strategi konservasi daerah penyangga kemudian dilakukan analisa dengan perhitungan gabungan pendapat keempat *stakeholder* untuk mengukur dan mengetahui prioritas dari tujuh variabel yang mempengaruhi strategi konservasi daerah penyangga (tabel 4.26). Kemudian dilakukan normalisasi hasil gabungan pendapat *stakeholder* (tabel 4.27) Selanjutnya dapat diketahui prioritas variabel berdasarkan pendapat seluruh *stakeholder* dapat dilihat pada tabel 4.28

Tabel 4.24 Perbandingan Berpasangan Variabel Strategi Konservasi Daerah penyangga *Expert 1 - Expert 4*

<i>Expert 1</i>							
	Penggunaan Lahan	Pengelolaan lahan	Jumlah Penduduk	Partisipasi Masyarakat	Mata Pencaharian	Kebijakan	Kelembagaan
Penggunaan Lahan		8	7	6	5	2	3
Pengelolaan Lahan	1/8		5	2	1	1/2	1
Jumlah Penduduk	1/7	1/5		1/3	2	1/3	1/3
Partisipasi Masyarakat	1/6	1/2	3		1	1/2	1/2
Mata Pencaharian	1/5	1	1/2	1		1/3	1/2
Kebijakan	1/2	2	3	2	3		1/3
Kelembagaan	1/3	1	3	2	2	3	
<i>Expert 2</i>							
Penggunaan Lahan		1	3	3	3	1/4	1/7
Pengelolaan Lahan	1		2	1	2	1/3	1/5
Jumlah Penduduk	1/3	1/2		1	2	1/6	1/4
Partisipasi Masyarakat	1/3	1	1		2	1/6	1/4
Mata Pencaharian	1/3	1/2	1/2	1/2		1/3	1/6
Kebijakan	4	3	3	6	3		1/7
Kelembagaan	7	5	5	4	6	7	
<i>Expert 3</i>							
Penggunaan Lahan		4	4	5	4	2	3
Pengelolaan Lahan	1/4		3	1	2	1/3	1/6
Jumlah Penduduk	1/4	1/3		1	1	1/2	1/4
Partisipasi Masyarakat	1/5	1	1		2	1/2	1/5
Mata Pencaharian	1/4	1/2	1	1/2		1/4	1/6
Kebijakan	1/2	3	2	2	4		1/7
Kelembagaan	1/3	6	4	5	6	7	
<i>Expert 4</i>							
Penggunaan Lahan		4	4	3	3	2	1/6
Pengelolaan Lahan	1/4		3	2	2	1/3	1/5
Jumlah Penduduk	1/4	1/3		2	1	1/2	1/7
Partisipasi Masyarakat	1/3	1/2	1/2		1	1/2	1/7
Mata Pencaharian	1/3	1/2	1	1		1/4	1/6
Kebijakan	1/2	3	2	2	4		1/7
Kelembagaan	6	5	8	7	6	7	

Tabel 4. 25 Priority Vector (VP) Variabel Strategi Konservasi Daerah Penyangga Expert 1 - Expert 4

	Expert 1		Expert 2		Expert 3		Expert 4	
	Priority Vector (VP)	Indeks Konsistensi	Priority Vector (VP)	Indeks Konsistensi	Priority Vector (VP)	Indeks Konsistensi	Priority Vector (VP)	Indeks Konsistensi
Penggunaan Lahan	0,406		0,096		0,327		0,169	
Pengelolaan Lahan	0,109		0,075		0,072		0,079	
Jumlah Penduduk	0,049		0,053		0,052		0,050	
Partisipasi Masyarakat	0,072	0,09	0,058	0,09	0,060	0,08	0,045	0,07
Mata Pencaharian	0,062		0,040		0,043		0,046	
Kebijakan	0,142		0,202		0,123		0,117	
Kelembagaan	0,161		0,476		0,324		0,493	
Total VP	1		1		1		1	

Tabel 4.26 Hasil Gabungan Pendapat Stakeholder terhadap Strategi Konservasi Daerah Penyangga di Kecamatan Mojoroto

	Penggunaan Lahan	Pengelolaan lahan	Jumlah Penduduk	Partisipasi Masyarakat	Mata Pencaharian	Kebijakan	Kelembagaan
Penggunaan Lahan	1	3 1/3	4 2/7	4	3 2/3	1 1/5	2/3
Pengelolaan Lahan	2/7	1	3	1 2/5	1 2/3	1/3	2/5
Jumlah Penduduk	1/4	1/3	1	1	1 2/5	1/3	1/4
Partisipasi Masyarakat	1/4	5/7	1 1/9	1	1 2/5	1/3	1/3
Mata Pencaharian	2/7	3/5	5/7	5/7	1	1/3	1/3
Kebijakan	5/6	2 5/7	2 4/9	2 5/8	3 1/2	1	1/4
Kelembagaan	1 1/2	3 1/2	4 2/3	4	4 5/9	5 2/3	1

Tabel 4.27 Normalisasi Hasil Gabungan Pendapat Stakeholder terhadap Strategi Konservasi Daerah Penyangga

	Penggunaan Lahan	Pengelolaan lahan	Jumlah Penduduk	Partisipasi Masyarakat	Mata Pencaharian	Kebijakan	Kelembagaan
Penggunaan Lahan	191/833	228/827	119/481	109/398	95/446	83/638	199/932
Pengelolaan Lahan	3/44	5/61	97/545	15/157	40/409	34/865	94/761
Jumlah Penduduk	3/56	19/714	36/623	21/344	69/839	4/121	65/862
Partisipasi Masyarakat	28/495	4/69	11/172	5/74	69/839	4/121	71/736
Mata Pencaharian	39/623	27/554	19/465	44/921	51/877	13/366	86/907
Kebijakan	59/306	2/9	77/544	146/821	195/968	85/777	23/279
Kelembagaan	214/635	181/631	142/525	207/749	57/215	329/531	59/188
Total	191/833	228/827	119/481	109/398	95/446	83/638	199/932

Tabel 4.28 Priority Vector Hasil Gabungan Pendapat Stakeholder terhadap Strategi Konservasi Daerah Penyangga

	Total Normalisasi Gabungan Pendapat	Priority Vector (VP)	Rating Prioritas
Penggunaan Lahan	1 211/362	0,226	II
Pengelolaan Lahan	453/662	0,098	IV
Jumlah Penduduk	53/136	0,056	VI
Partisipasi Masyarakat	141/308	0,065	V
Mata Pencaharian	350/901	0,055	VII
Kebijakan	1 6/47	0,161	III
Kelembagaan	2 24/65	0,338	I



Berdasarkan perhitungan gabungan pendapat *stakeholder*, diketahui bahwa pendapat keempat *stakeholder* telah konsisten karena telah memenuhi ketentuan konsistensi pendapat $<10\%$. Berdasarkan analisis terhadap pendapat *stakeholder* menggunakan metode AHP maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki rating tertinggi sebagai prioritas pertama dalam mempengaruhi strategi konservasi daerah penyangga adalah variabel kelembagaan. Berikut merupakan urutan variabel yang mempengaruhi berdasarkan pada rating untuk prioritas dalam strategi konservasi daerah penyangga.

1. Kelembagaan
2. Penggunaan lahan
3. Kebijakan
4. Pengelolaan lahan
5. Partisipasi Masyarakat
6. Jumlah Penduduk
7. Mata Pencaharian

Rating yang di dapatkan dari analisis AHP menyatakan kelembagaan berada pada peringkat pertama. Jika dilihat dari gabungan pendapat *stakeholder* dan *priority vector*, kelembagaan memiliki nilai yang paling tinggi. Berdasarkan isu perencanaan, penggunaan lahan merupakan variabel yang mendominasi dalam memberikan dampak negatif pada kawasan lindung maupun kawasan penyangga. Seperti dijelaskan dalam RTRW bahwa ada berbagai guna lahan yang dapat menarik aktivitas warga, seperti guna lahan wisata dan pendidikan. Pada dasarnya guna lahan hanya sebagai objek peningkatan aktivitas masyarakat. Jika guna lahan berubah namun aktivitas masyarakat dapat dibatasi, maka dampak negatif terhadap kawasan yang dikonservasi dapat diatasi.

Pada kondisi eksisting kelembagaan memberikan dampak positif pada kawasan lindung maupun kawasan penyangga. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan lembaga yang ada untuk penyuluhan pertanian di lahan pertanian yang berbatasan dengan daerah penyangga. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan variabel yang berperan dalam pengelolaan fungsi daerah penyangga (usaha konservasi). Aktifnya kelembagaan dapat membantu/ menekan kegiatan penduduk yang dapat merusak lingkungan. Dalam hal ini kelembagaan memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan variabel lainnya. Oleh karena itu didapatkan hasil dari pendapat

stakeholder adalah kelembagaan pada rating prioritas pertama dapat diaplikasikan pada analisis selanjutnya dalam menentukan strategi konservasi.

Isu perencanaan yang mendesak kawasan lindung dan penyangga pada dokumen perencanaan adalah variabel penggunaan lahan. Pada kondisi eksisting guna lahan yang ada disekitar hutan lindung memiliki potensi untuk dikembangkan dan dapat memberikan dampak yang buruk pada daerah konservasi. Namun pemerintah bersama masyarakat bekerjasama dalam membangun daerah konservasi tanpa merusak hutan lindung. Maka ancaman guna lahan yang ada pada daerah penyangga dapat ditekan. Dengan adanya kerjasama dari pemerintah dalam melestarikan kawasan penyangga maka guna lahan yang digunakan masyarakat untuk berkegiatan akan dapat menekan perubahan guna lahan terbangun pada kawasan penyangga.

Kebijakan merupakan usaha pemerintah dalam menjalankan kegiatan konservasi. Berbagai kebijakan telah dibuat untuk menjaga hutan lindung dari kerusakan berada pada rating ke tiga disebabkan kondisi eksisting banyak masyarakat yang tidak mengetahui isi dari kebijakan tersebut. Sedangkan untuk pengelolaan lahan, partisipasi masyarakat, dan jumlah penduduk berturut-turut berada pada peringkat ke 4, 5, 6. Pada kondisi eksisting variabel tersebut akan meningkat menjadi lebih baik apabila pengetahuan masyarakat meningkat dan hal tersebut dapat diperbaiki pada variabel kelembagaan.

Pada rating pendapat *stakeholder* mata pencaharian berada pada peringkat terakhir dikarenakan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat aktif dalam mengikuti kegiatan. Selain itu dengan berbagai kegiatan masyarakat dan tingkat perekonomian yang berbeda-beda, tidak ada masyarakat yang merusak hutan. Masyarakat lebih memilih meningkatkan pendapat dan berganti mata pencaharian di luar daerah penyangga seperti pada sector industri. Oleh karena itu mata pencaharian mendapat rating ke 7 berdasarkan pendapat *stakeholder*.

Pada tahap selanjutnya yaitu menentukan alternatif strategi konservasi daerah penyangga hutan lindung di Kecamatan Mojojoto. Urutan prioritas ini mempengaruhi pada tahap analisis selanjutnya yang kemudian berpengaruh terhadap strategi yang dihasilkan. Kemudian rating AHP akan digunakan untuk pembobotan potensi (*Strenght*), masalah (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*) hingga menghasilkan strategi konservasi. Metode yang digunakan untuk menentukan strategi konservasi daerah penyangga

adalah SWOT. Penggunaan metode SWOT pada tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi (*Strenght*), masalah (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*) yang mempengaruhi strategi konservasi daerah penyangga hutan lindung.

4.7 Analisis SWOT

Analisis SWOT pada tahapan ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi, masalah, peluang maupun ancaman yang mempengaruhi strategi konservasi daerah penyangga berdasarkan *stakeholder* dan hasil survey primer terhadap responden. Penggunaan metode SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu potensi dan masalah di daerah penyangga. Kemudian dilakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap faktor internal dan faktor eksternal daerah penyangga, yang terdiri dari *strength*, *weakness*, *opportunity* dan *threat*.

Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi terhadap faktor potensi (*Strenght*), masalah (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*) maka dapat digunakan untuk menghasilkan strategi dan masing-masing alternatif strategi setelah mendapatkan nilai bobot dan rating pada analisa IFAS-EFAS. Sehingga secara garis besar bahwa metode SWOT digunakan untuk identifikasi dan inventarisasi potensi, masalah, peluang maupun ancaman kemudian digunakan sebagai input metode IFAS-EFAS menghasilkan strategi sebagai alternatif strategi konservasi daerah penyangga.



Tabel 4.29 Strength, Weakness, Opportunity, Threat Strategi Konservasi Daerah Penyangga Hutan Lindung

Variabel	Faktor Internal		Faktor eksternal	
	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITY	THREAT
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya lembaga pemasyarakatan yang memiliki ahli dalam bidang pengelolaan fungsi kawasan dapatdi manfaatkan sebagai konsultan/penasehat pada struktur kelembagaan. • Adanya kelompok tani sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan (alat, bibit, pupuk) pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang diadakan lembaga (kelompok tani dan karang taruna) tidak rutin dilakukan, sehingga kegiatan tidak berjalan lancar • Kurangnya peran lembaga tani dalam membantu para petani sehingga masalah dalam pertanian sulit diselesaikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama antara kelembagaan dan pemerintah dalam penyuluhan pertanian sehingga menarik minat masyarakat aktif dalam suatu kegiatan. 	-
Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya persawahan dengan irigasi teknis yang ada di daerah penyangga sehingga alih fungsi lahan dapat dikendalikan. • Keberadaan perkebunan campur dapat dijadikan sebagai salah satu aspek penyuluhan pemerintah. • Penggunaan lahan yang berbatasan dengan hutan lindung sebagai tempat penyuluhan petani sehingga lahan yang berbatasan langsung dapat mendukung fungsi daerah penyangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat menjual lahan pertanian untuk pengembangan perumahan sehingga mengurangi lahan resapan • Guna lahan yang tidak sesuai yaitu pada kawasan perlindungan setempat dapat menyebabkan bencana alam. • Lahan permukiman yang terus bertambah, dikhawatirkan dapat mengakibatkan penambahan guna lahan terbangun dalam dalam usaha penduduk untuk memenuhi fasilitasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian yang ada di Kecamatan Mojojoto dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pengembangan permukiman oleh <i>stakeholder</i> yang menyebabkan alih fungsi lahan.
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame ditetapkan sebagai daerah penyangga sehingga hutan lindung tidak mengalami kerusakan lingkungan • Pertanian lahan kering dipertahankan di kawasan pinggiran kota bagian timur tepatnya Kecamatan Mojojoto sehingga hasil produksi pertanian dapat dipertahankan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah permukiman, pariwisata, industri dan pendidikan. Dalam pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan SWP Kediri, arahan pengelolaan kawasan untuk mempertahankan sawah irigasi yang ada Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame di Kecamatan Mojojoto sehingga konversi pertanian dapat dikendalikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Mojojoto merupakan pusat pengembangan sektor permukiman, pendidikan, industri dan wisata sehingga sektor tersebut dapat menjadi pusat kegiatan
Pengelolaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan peralatan sederhana sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah dan lebih ramah lingkungan • Irigasi memanfaatkan sumber air 	<ul style="list-style-type: none"> • Mayoritas petani memiliki pendidikan terakhir tamat SD sehingga pengetahuan mengenai pengelolaan lahan terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya berbagai teknik pengelolaan sebelum penanaman hingga hasil pertanian , dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan 	

Variabel	Faktor Internal		Faktor eksternal	
	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITY	THREAT
	yang ada di hutan lindung sehingga pemanfaatan sumber daya yang ada lebih dimanfaatkan		sehingga masyarakat yang belum bekerja tertarik untuk bertani. • Adanya kerjasama dengan pabrik gula di Kecamatan Pesantren untuk pengolahan hasil pertanian yang dengan tanaman tebu.	-
Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pada kegiatan penyuluhan yang diadakan pemerintah, masyarakat (petani) bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan, namun ikut menyalurkan aspirasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat (selain petani) mayoritas tidak mengetahui fungsi daerah penyangga sehingga hanya sedikit yang mengikuti kegiatan yang diadakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dan evaluasi penyuluhan dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan termotivasi mengikuti kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk industri kecil di Kecamatan Kota mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyuluhan pertanian.
Jumlah Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk usia produktif merupakan jumlah penduduk terbanyak sehingga usaha pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk terus meningkat seiring dengan peningkatan guna lahan permukiman tiap tahunnya, sehingga usaha pemenuhan tempat untuk bermukim akan terus meningkat. 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perpindahan penduduk ke Kecamatan Mojojoto akan mengakibatkan perubahan guna lahan menjadi lahan terbangun. • Adanya daya tarik perkotaan yang tinggi hingga menyebabkan arus urbanisasi ke kota yang cukup tinggi dan mendesak daerah pingiran (penyangga)
Mata Pencaharian	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dapat mendukung usaha pemerintah dalam mempertahankan guna lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk paling banyak adalah belum bekerja sehingga belum dapat mendukung guna lahan pertanian (terbesar) 	-	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Industri pada Kecamatan Kota yang berkembang pesat menarik minat masyarakat untuk memilih sektor industri sebagai mata pencaharian untuk meningkatkan perekonomian.

Tabel 4.30 SO,WO,ST,WT Konservasi Daerah Penyangga Hutan Lindung di Kecamatan Mojooroto Kota Kediri

FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
<p>FAKTOR INTERNAL</p>	<p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya lembaga pemasyarakatan yang memiliki ahli dalam bidang pengelolaan fungsi kawasan dapat dimanfaatkan sebagai konsultan/penasehat pada struktur kelembagaan.. • Adanya kelompok tani sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan (alat, bibit, pupuk) pertanian. <p>Penggunaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya persawahan dengan irigasi teknis yang ada di daerah penyangga sehingga alih fungsi lahan dapat dikendalikan. • Keberadaan perkebunan campur dapat dijadikan sebagai salah satu aspek penyuluhan pemerintah. • Penggunaan lahan yang berbatasan dengan hutan lindung sebagai tempat penyuluhan petani sehingga lahan yang berbatasan langsung dapat mendukung fungsi daerah penyangga <p>Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame ditetapkan sebagai daerah penyangga sehingga hutan lindung tidak mengalami kerusakan lingkungan • Pertanian lahan kering dipertahankan di kawasan pinggiran kota bagian timur tepatnya Kecamatan Mojooroto sehingga hasil produksi pertanian dapat dipertahankan <p>Pengelolaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan peralatan sederhana sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah dan lebih ramah lingkungan • Irigasi memanfaatkan sumber air yang ada di hutan lindung sehingga pemanfaatan sumber daya yang ada lebih dimanfaatkan <p>Jumlah Penduduk</p> <p>Jumlah penduduk usia produktif merupakan jumlah penduduk terbanyak sehingga usaha pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan.</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>Pada kegiatan penyuluhan yang diadakan pemerintah, masyarakat (petani) bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan, namun ikut menyalurkan aspirasi.</p> <p>Mata Pencaharian</p> <p>Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dapat mendukung usaha pemerintah dalam mempertahankan guna lahan pertanian.</p>	<p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan yang diadakan lembaga (kelompok tani dan karang taruna) tidak rutin dilakukan, sehingga kegiatan tidak berjalan lancar • Kurangnya peran lembaga tani dalam membantu para petani sehingga masalah dalam pertanian sulit diselesaikan. <p>Penggunaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat menjual lahan pertanian untuk pengembangan perumahan sehingga mengurangi lahan resapan • Guna lahan yang tidak sesuai yaitu pada kawasan perlindungan setempat dapat menyebabkan bencana alam. • Lahan permukiman yang terus bertambah, dikhawatirkan dapat mengakibatkan penambahan guna lahan terbangun dalam dalam usaha penduduk untuk memenuhi fasilitasnya. <p>Kebijakan</p> <p>Kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah permukiman, pariwisata, industri dan pendidikan. Dalam pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya</p> <p>Pengelolaan Lahan</p> <p>Mayoritas petani memiliki pendidikan terakhir tamat SD sehingga pengetahuan mengenai pengelolaan lahan terbatas.</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <p>Masyarakat (selain petani) mayoritas tidak mengetahui fungsi daerah penyangga sehingga hanya sedikit yang mengikuti kegiatan yang diadakan.</p> <p>Jumlah Penduduk</p> <p>Jumlah penduduk terus meningkat seiring dengan peningkatan guna lahan permukiman tiap tahunnya, sehingga usaha pemenuhan tempat untuk bermukim akan terus meningkat</p> <p>Mata Pencaharian</p> <p>Penduduk paling banyak adalah belum bekerja sehingga belum dapat mendukung guna lahan pertanian (terbesar)</p>

	FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
<p>OPPORTUNITY</p>	<p>Kelembagaan Adanya kerjasama antara kelembagaan dan pemerintah dalam penyuluhan pertanian sehingga menarik minat masyarakat aktif dalam suatu kegiatan.</p> <p>Penggunaan Lahan Pertanian yang ada di Kecamatan Mojojoto dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.</p> <p>Kebijakan Pengembangan SWP Kediri, arahan pengelolaan kawasan untuk mempertahankan sawah irigasi yang ada Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame di Kecamatan Mojojoto sehingga konversi pertanian dapat dikendalikan.</p> <p>Pengelolaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya berbagai teknik pengelolaan sebelum penanaman hingga hasil pertanian, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat yang belum bekerja tertarik untuk bertani. • Adanya kerjasama dengan pabrik gula di Kecamatan Pesantren untuk pengolahan hasil pertanian yang dengan tanaman tebu. <p>Partisipasi Masyarakat Pengawasan dan evaluasi penyuluhan dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan termotivasi mengikuti kegiatan.</p>	<p>STRATEGI SO</p> <p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan tani menjalankan kegiatan penyuluhan secara rutin sesuai yang dijadwalkan pemerintah • Memperbaiki struktur kelembagaan dengan lembaga pemasyarakatan sebagai penasehat dan pemerintah sebagai pengawas kegiatan. <p>Penggunaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan campur dijadikan sebagai salah satu aspek penyuluhan pemerintah sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. • Melakukan tindakan konservasi secara mekanik dan vegetative agar sawah irigasi tidak beralih fungsi • Mengembalikan fungsi kawasan agar alih fungsi lahan dapat dikendalikan. <p>Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan kebijakan perlindungan terhadap sawah irigasi teknis terhadap masyarakat. • Mensosialisasikan pentingnya hutan lindung daerah penyangga dan guna lahan yang diperbolehkan di daerah penyangga dalam usaha menghindari konversi lahan. <p>Pengelolaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan penggunaan peralatan yang ramah lingkungan dalam mengelola lahan. • Memanfaatkan mata air yang ada di hutan lindung sebagai sumber irigasi dan pemenuhan kebutuhan dengan teknik pengelolaan secara partisipatif. • Menggunakan teknik pengelolaan dari penyuluhan yaitu penggiliran tanaman dan lokasi penanaman secara berkala agar hasil yang didapat maksimal. <p>Jumlah Penduduk Penduduk produktif yang belum bekerja diarahkan untuk mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian agar dapat diberdayakan untuk inovasi pengembangan hasil pertanian.</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melatih masyarakat untuk <i>self monitoring</i>. • Memanfaatkan penyuluhan pemerintah sebagai bahan evaluasi <p>Mata Pencabarian Inovasi hasil pertanian diperluas untuk mendapatkan keuntungan optimal untuk memotivasi masyarakat menjadi petani.</p>	<p>STRATEGI WO</p> <p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh lembaga sesuai dengan yang telah dijadwalkan secara rutin. • Meningkatkan peran lembaga tani dalam kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok tani untuk memberikan usulan kegiatan. <p>Penggunaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan penataan guna lahan yang ada pada daerah penyangga dengan <i>zoning regulation</i>. • Menjadikan pertanian sebagai guna lahan utama di daerah penyangga untuk menghindari penjualan lahan oleh masyarakat • diberikan perlakuan khusus agar dapat dikendalikan perkembangannya. <p>Kebijakan Adanya arahan untuk pengembangan kawasan berbasis pelestarian alam dan partisipasi masyarakat.</p> <p>Pengelolaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan teknik pengelolaan hasil pertanian modern agar masyarakat dapat mengelola hasil pertanian sendiri. • Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membentuk kelompok belajar dalam praktek penyuluhan pertanian. <p>Partisipasi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan berbasis partisipatif seperti penanaman kembali jalur hijau agar masyarakat selain petani lebih mengerti fungsi kawasan. • Pengawasan dan evaluasi dari pemerintah secara perlahan-lahan dikembalikan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengevaluasi hasil kerjanya sendiri. <p>Jumlah Penduduk Mencanangkan program KB pada penduduk.</p> <p>Mata Pencabarian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencanaan program pertanian yang persuasive, sehingga masyarakat tertarik untuk bertani. • Memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bersedia mengelola lahan pertanian seperti memberikan bantuan peralatan pertanian.

	FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
THREAT	<p>Penggunaan Lahan Adanya pengembangan permukiman oleh <i>stakeholder</i> yang menyebabkan alih fungsi lahan di daerah penyangga</p> <p>Kebijakan Kecamatan Mojoroto merupakan pusat pengembangan sektor permukiman, pendidikan, industri dan wisata sehingga sektor tersebut dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat</p> <p>Partisipasi Masyarakat Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk industri kecil di Kecamatan Kota mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyuluhan pertanian.</p> <p>Jumlah Penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya perpindahan penduduk ke Kecamatan Mojoroto akan mengakibatkan perubahan guna lahan menjadi lahan terbangun • Adanya daya tarik perkotaan yang tinggi hingga menyebabkan arus urbanisasi ke kota yang cukup tinggi dan mendesak daerah pingiran (penyangga) <p>Mata Pencaharian Sektor Industri pada Kecamatan Kota yang berkembang pesat menarik minat masyarakat untuk memilih sektor industri sebagai mata pencaharian untuk meningkatkan perekonomian.</p>	<p>STRATEGI ST</p> <p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan tani menjalankan kegiatan penyuluhan secara rutin sesuai yang dijadwalkan pemerintah • Memperbaiki struktur kelembagaan dengan lembaga pemasyarakatan sebagai penasehat dan pemerintah sebagai pengawas kegiatan. <p>Penggunaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan guna lahan sesuai dengan fungsi kawasan dengan <i>zoning regulation</i>. • Melakukan tindakan konservasi secara mekanik dan vegetative agar sawah irigasi tidak beralih fungsi. <p>Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arahan kebijakan pengembangan daerah penyangga sebagai pusat pelestarian alam dan sejarah. • Arahan untuk sector pertanian sebagai pusat penyuluhan pertanian di Kota Kediri. <p>Pengelolaan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan penggunaan peralatan yang ramah lingkungan dalam mengelola lahan. • Memanfaatkan mata air yang ada di hutan lindung sebagai sumber irigasi dan pemenuhan kebutuhan dengan teknik pengelolaan secara partisipatif. <p>Partisipasi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadakan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hasil pertanian dan perkebunan yang ada di daerahnya. • Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk membentuk kegiatan atas inisiatif sendiri. <p>Jumlah Penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempersulit pembuatan KK di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame. • Mengadakan kegiatan pemberdayaan pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan untuk masyarakat produktif. <p>Mata Pencaharian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan insentif dan disinsentif bagi masyarakat yang bersedia turut serta dalam pengelolaan lahan pertanian guna menjaga kelestarian lingkungan. 	<p>STRATEGI WT</p> <p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh lembaga sesuai dengan yang telah dijadwalkan secara rutin. • Menjalankan kegiatan kelembagaan yang ad secara rutin. <p>Penggunaan Lahan Dilakukan penataan guna lahan yang ada pada daerah penyangga dengan <i>zoning regulation</i>.</p> <p>Kebijakan Adanya arahan untuk pengembangan kawasan berbasis pelestarian alam dan partisipasi masyarakat.</p> <p>Pengelolaan Lahan Meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membentuk kelompok belajar dalam praktek penyuluhan pertanian</p> <p>Partisipasi Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan berbasis partisipatif seperti penanaman kembali jalur hijau agar masyarakat selain petani lebih mengerti fungsi kawasan. • Mengadakan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hasil pertanian dan perkebunan yang ada di daerahnya. <p>Jumlah Penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganangkan program KB. • Mempersulit pembuatan KK di Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame. <p>Mata Pencaharian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencanaan program pertanian yang persuasive, sehingga masyarakat tertarik untuk bertani. • Menetapkan insentif dan disinsentif bagi masyarakat yang bersedia turut serta dalam pengelolaan lahan pertanian guna menjaga kelestarian lingkungan.

Setelah menghasilkan berbagai alternative untuk masing-masing variabel, selanjutnya disusun kriteria untuk bobot setiap variabel faktor internal dan eksternal untuk daerah penyangga. Kriteria didasarkan pada potensi dan masalah setiap faktor, potensi yang maksimal akan mendapatkan nilai yang tinggi, sedangkan masalah akan mendapat nilai yang paling kecil.

Tabel 4.31 Kriteria Pembobotan Variabel IFAS-EFAS Strategi Konservasi Daerah Penyangga

Faktor	Variabel	Kriteria
Strength	Kelembagaan	<p>Adanya lembaga pemasyarakatan yang memiliki ahli dalam bidang pengelolaan fungsi kawasan dapat di manfaatkan sebagai konsultan/penasehat pada struktur kelembagaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada lembaga pemasyarakatan yang memiliki ahli dalam bidang pengelolaan fungsi kawasan yang dapat di manfaatkan sebagai konsultan/penasehat pada struktur kelembagaan 2. Adanya lembaga pemasyarakatan yang memiliki ahli dalam bidang pengelolaan fungsi kawasan, namun belum dapat di manfaatkan sebagai konsultan/penasehat pada struktur kelembagaan 3. Adanya lembaga pemasyarakatan yang memiliki ahli dalam bidang pengelolaan fungsi kawasan dapat di manfaatkan sebagai konsultan/penasehat pada struktur kelembagaan.
		<p>Adanya kelompok tani sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan (alat, bibit, pupuk) pertanian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kelompok tani sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan (alat, bibit, pupuk) pertanian. 2. Adanya kelompok tani namun belum dapat memenuhi kebutuhan (alat, bibit, pupuk) pertanian. 3. Adanya kelompok tani sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan (alat, bibit, pupuk) pertanian.
		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya persawahan dengan irigasi teknis yang ada di daerah penyangga sehingga alih fungsi lahan dapat dikendalikan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada persawahan dengan irigasi teknis yang ada di daerah penyangga sehingga alih fungsi lahan tidak dapat dikendalikan. 2. Adanya persawahan dengan irigasi teknis yang ada di daerah penyangga sehingga alih fungsi lahan dapat dikendalikan. 3. Adanya persawahan dengan irigasi teknis yang ada di daerah penyangga sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan.
	Penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan perkebunan campur dapat dijadikan sebagai salah satu aspek penyuluhan pemerintah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkebunan campur tidak dijadikan sebagai salah satu aspek penyuluhan pemerintah sehingga tidak dapat menjadi sumber pendapatan daerah. 2. Keberadaan perkebunan campur dapat dijadikan sebagai salah satu aspek penyuluhan pemerintah. 3. Perkebunan campur dijadikan sebagai salah satu aspek penyuluhan pemerintah sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
		<p>Penggunaan lahan yang berbatasan dengan hutan lindung sebagai tempat penyuluhan petani sehingga lahan yang berbatasan langsung dapat mendukung fungsi daerah penyangga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan yang berbatasan dengan hutan lindung tidak digunakan untuk penyuluhan petani sehingga lahan yang berbatasan langsung tidak dapat mendukung fungsi daerah penyangga. 2. Lahan yang berbatasan dengan hutan lindung digunakan untuk penyuluhan petani namun lahan yang berbatasan langsung belum dapat mendukung fungsi daerah penyangga 3. Penggunaan lahan yang berbatasan dengan hutan lindung sebagai tempat penyuluhan petani sehingga lahan yang berbatasan langsung dapat mendukung fungsi daerah penyangga

Faktor	Variabel	Kriteria
Kebijakan	<p>Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame ditetapkan sebagai daerah penyangga sehingga hutan lindung tidak mengalami kerusakan lingkungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada penetapan kelurahan yang menjadi daerah penyangga. 2. Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame ditetapkan sebagai daerah penyangga namun hutan lindung masih mengalami kerusakan lingkungan. 3. Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame ditetapkan sebagai daerah penyangga sehingga hutan lindung tidak mengalami kerusakan lingkungan.
	<p>Pertanian lahan kering dipertahankan di kawasan pinggiran kota bagian timur tepatnya Kecamatan Mojoroto sehingga hasil produksi pertanian dapat dipertahankan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian lahan kering tidak dipertahankan di Kota Kediri sehingga hasil produksi pertanian tidak diperhatikan. 2. Pertanian lahan kering dipertahankan di kawasan pinggiran kota bagian timur tepatnya Kecamatan Mojoroto sehingga hasil produksi pertanian dapat dipertahankan. 3. Pertanian lahan kering dipertahankan di Kota Kediri sehingga hasil produksi pertanian dapat dipertahankan.
Pengelolaan lahan	<p>Menggunakan peralatan sederhana sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah dan lebih ramah lingkungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menggunakan peralatan sederhana sehingga biaya yang dikeluarkan lebih mahal dan tidak ramah lingkungan. 2. Menggunakan peralatan sederhana dan peralatan modern sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu mahal namun ada peralatan yang tidak ramah lingkungan. 3. Menggunakan peralatan sederhana sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah dan lebih ramah lingkungan.
	<p>Irigasi memanfaatkan sumber air yang ada di hutan lindung sehingga pemanfaatan sumber daya yang ada lebih maksimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irigasi tidak memanfaatkan sumber air yang ada di hutan lindung sehingga pemanfaatan sumber daya yang ada tidak maksimal. 2. Irigasi menggunakan sumber air yang ada di hutan lindung, namun pemanfaatan sumber daya yang ada belum maksimal. 3. Irigasi memanfaatkan sumber air yang ada di hutan lindung sehingga pemanfaatan sumber daya yang ada lebih maksimal.
Partisipasi Masyarakat	<p>Pada kegiatan penyuluhan yang diadakan pemerintah, masyarakat (petani) bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan, namun ikut menyalurkan aspirasi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kegiatan penyuluhan yang diadakan pemerintah, masyarakat (petani) hanya sebagai pendengar 2. Pada kegiatan penyuluhan yang diadakan pemerintah, masyarakat (petani) bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan, namun ikut menyalurkan aspirasi. 3. Pada kegiatan penyuluhan yang diadakan pemerintah, masyarakat (petani) sebagai pemegang keputusan mengenai perencanaan dan kegiatan yang diadakan di daerahnya.
Jumlah Penduduk	<p>Jumlah penduduk usia produktif merupakan jumlah penduduk terbanyak sehingga usaha pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk usia produktif merupakan jumlah penduduk paling rendah sehingga pemberdayaan tidak dapat diterapkan. 2. Jumlah penduduk usia produktif merupakan jumlah penduduk terbanyak namun usaha pemberdayaan masyarakat daerah tersebut tidak dapat diterapkan. 3. Jumlah penduduk usia produktif merupakan jumlah penduduk terbanyak sehingga usaha pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan.

Faktor	Variabel	Kriteria
	<p>Mata Pencaharian</p> <p>Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dapat mendukung usaha pemerintah dalam mempertahankan guna lahan pertanian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani sehingga usaha pemerintah menjaga guna lahan pertanian tidak dapat dipertahankan. 2. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dapat mendukung usaha pemerintah dalam mempertahankan guna lahan pertanian. 3. Seluruh penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani telah mendukung usaha pemerintah dalam mempertahankan guna lahan pertanian.
<p>Weakness</p>	<p>Kelembagaan</p> <p>Kegiatan yang diadakan lembaga (kelompok tani dan karang taruna) tidak rutin dilakukan, sehingga kegiatan tidak berjalan lancar Kegiatan yang diadakan lembaga (kelompok tani dan karang taruna) tidak rutin dilakukan, sehingga kegiatan tidak berjalan lancar</p> <p>Kurangnya peran lembaga tani dalam membantu para petani sehingga masalah dalam pertanian sulit diselesaikan.</p> <p>Penggunaan lahan</p> <p>Mayarakat menjual lahan pertanian untuk pengembangan perumahan sehingga mengurangi lahan resapan</p> <p>Guna lahan yang tidak sesuai yaitu pada kawasan perlindungan setempat dapat menyebabkan bencana alam.</p> <p>Lahan permukiman yang terus bertambah, dikhawatirkan dapat mengakibatkan penambahan guna lahan terbangun dalam usaha penduduk untuk memenuhi fasilitasnya.</p> <p>Kebijakan</p> <p>Kegiatan utama yang akan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang diadakan lembaga (kelompok tani dan karang taruna) rutin dilakukan sehingga kegiatan berjalan lancar. 2. Kegiatan yang diadakan lembaga (kelompok tani dan karang taruna) tidak rutin dilakukan namun kegiatan pertanian berjalan lancar 3. Kegiatan yang diadakan lembaga (kelompok tani dan karang taruna) tidak rutin dilakukan sehingga kegiatan pertanian tidak berjalan lancar <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga tani berperan dalam membantu para petani sehingga masalah dalam pertanian dapat diselesaikan. 2. Kurangnya peran lembaga tani dalam membantu para petani sehingga masalah dalam pertanian sulit diselesaikan. 3. Lembaga tani tidak berperan membantu masalah para petani sehingga masalah dalam pertanian tidak dapat diselesaikan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mengelola lahan pertanian untuk pengembangan berbasis pelestarian sehingga lahan resapan terjaga kelestariannya. 2. Masyarakat menjual lahan pertanian untuk pengembangan guna lahan berbasis pelestarian. 3. Mayarakat menjual lahan pertanian untuk pengembangan perumahan sehingga mengurangi lahan resapan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Guna lahan telah sesuai dengan fungsi kawasan. 2. Guna lahan yang tidak sesuai yaitu pada kawasan perlindungan setempat namun bencana alam dapat dihindari. 3. Guna lahan yang tidak sesuai yaitu pada kawasan perlindungan setempat dapat menyebabkan bencana alam. <ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan permukiman yang berkurang, sehingga guna lahan yang tidak terbangun dapat dimanfaatkan untuk pengembangan guna lahan yang bernilai ekonomis. 2. Lahan permukiman yang terus bertambah, dikhawatirkan dapat mengakibatkan penambahan guna lahan terbangun dalam usaha penduduk untuk memenuhi fasilitasnya. 3. Lahan permukiman yang terus bertambah, mengakibatkan penambahan guna lahan terbangun dalam usaha penduduk memenuhi fasilitasnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah guna lahan berbasis

Faktor	Variabel	Kriteria
	dikembangkan adalah permukiman, pariwisata, industri dan pendidikan. Dalam pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya	<p>pelestarian alam dan partisipasi masyarakat.</p> <p>2. Kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah permukiman, pariwisata, industri dan pendidikan. Dalam pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilengkapi fasilitas-fasilitas penunjangnya.</p> <p>3. Kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah permukiman, pariwisata, industri dan pendidikan. Dalam pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya.</p>
	Pengelolaan lahan Mayoritas petani memiliki pendidikan terakhir tamat SD sehingga pengetahuan mengenai pengelolaan lahan terbatas.	<p>1. Mayoritas petani memiliki pendidikan terakhir sarjana sehingga pengetahuan mengenai pengelolaan lahan terpenuhi.</p> <p>2. Mayoritas petani memiliki pendidikan terakhir tamat SD sehingga pengetahuan mengenai pengelolaan lahan terbatas.</p> <p>3. Mayoritas petani memiliki tidak bersekolah sehingga tidak memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan lahan.</p>
	Partisipasi Masyarakat Masyarakat (selain petani) mayoritas tidak mengetahui fungsi daerah penyangga sehingga hanya sedikit yang mengikuti kegiatan yang diadakan.	<p>1. Masyarakat (selain petani) mayoritas mengetahui fungsi daerah penyangga sehingga semua penduduk mengikuti kegiatan yang diadakan.</p> <p>2. Masyarakat (selain petani) mayoritas tidak mengetahui fungsi daerah penyangga sehingga hanya sedikit yang mengikuti kegiatan yang diadakan.</p> <p>3. Masyarakat (selain petani) mayoritas tidak mengetahui fungsi daerah penyangga sehingga tidak ada yang mengikuti kegiatan penyuluhan.</p>
	Jumlah Penduduk Jumlah penduduk terus meningkat seiring dengan peningkatan guna lahan permukiman tiap tahunnya, sehingga usaha pemenuhan tempat untuk bermukim akan terus meningkat	<p>1. Jumlah penduduk berkurang seiring dengan usaha pemenuhan tempat untuk bermukim.</p> <p>2. Jumlah penduduk terus meningkat seiring dengan peningkatan guna lahan permukiman tiap tahunnya, namun tidak ada peningkatan aktivitas masyarakat.</p> <p>3. Jumlah penduduk terus meningkat seiring dengan peningkatan guna lahan permukiman tiap tahunnya, sehingga usaha pemenuhan tempat untuk bermukim akan terus meningkat.</p>
	Mata Pencarian Penduduk paling banyak adalah belum bekerja sehingga belum dapat mendukung guna lahan pertanian (terbesar).	<p>1. Penduduk paling banyak adalah bekerja sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.</p> <p>2. Penduduk paling banyak adalah belum bekerja sehingga belum dapat mendukung guna lahan pertanian (terbesar).</p> <p>3. Penduduk paling banyak adalah belum bekerja sehingga tidak dapat mendukung guna lahan pertanian (terbesar).</p>
Opportunity	Kelembagaan Adanya kerjasama antara kelembagaan dan pemerintah dalam penyuluhan pertanian sehingga menarik minat masyarakat aktif dalam suatu kegiatan.	<p>1. Tidak adanya kerjasama antara kelembagaan dan pemerintah dalam penyuluhan pertanian sehingga masyarakat pasif dalam suatu kegiatan.</p> <p>2. Adanya kerjasama antara kelembagaan dan pemerintah dalam penyuluhan pertanian namun masyarakat pasif dalam berkegiatan.</p> <p>3. Adanya kerjasama antara kelembagaan dan pemerintah dalam penyuluhan pertanian sehingga menarik minat masyarakat aktif dalam suatu kegiatan.</p>

Faktor	Variabel	Kriteria
Penggunaan lahan	Pertanian yang ada di Kecamatan Mojojoto dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guna lahan terbangun yang ada di Kecamatan Mojojoto dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. 2. Pertanian yang ada di Kecamatan Mojojoto dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. 3. Guna lahan tidak terbangun yang ada di Kecamatan Mojojoto dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Kebijakan	Pengembangan SWP Kediri, arahan pengelolaan kawasan untuk mempertahankan sawah irigasi yang ada Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame di Kecamatan Mojojoto sehingga konversi pertanian dapat dikendalikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan SWP Kediri, tidak ada arahan pengelolaan kawasan daerah penyangga di Kecamatan Mojojoto sehingga terjadi konversi pertanian. 2. Pengembangan SWP Kediri, arahan pengelolaan kawasan untuk mempertahankan sawah irigasi yang ada Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame di Kecamatan Mojojoto sehingga konversi pertanian dapat dikendalikan. 3. Pengembangan SWP Kediri, arahan pengelolaan kawasan untuk mempertahankan guna lahan tidak terbangun yang dapat memberikan nilai ekonomis di Kecamatan Mojojoto sehingga konversi pertanian dapat diatasi.
Pengelolaan lahan	Adanya berbagai teknik pengelolaan sebelum penanaman hingga hasil pertanian, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat yang belum bekerja tertarik untuk bertani.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada teknik pertanian yang modern untuk meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat yang belum bekerja tidak tertarik untuk bertani. 2. Adanya berbagai teknik pengelolaan sebelum penanaman hingga hasil pertanian , dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat yang belum bekerja tertarik untuk bertani. 3. Adanya berbagai teknik pengelolaan sebelum penanaman hingga hasil pertanian, telah dimanfaatkan dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat yang belum bekerja tertarik untuk bertani.
Partisipasi Masyarakat	Adanya kerjasama dengan pabrik gula di Kecamatan Pesantren untuk pengolahan hasil pertanian yang dengan tanaman tebu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada kerjasama dengan pihak luar daerah untuk pengolahan hasil pertanian yang dengan tanaman tebu. 2. Adanya kerjasama dengan pabrik gula di dalam kawasan untuk pengolahan hasil pertanian yang dengan tanaman tebu. 3. Adanya kerjasama dengan pabrik gula di Kecamatan Pesantren untuk pengolahan hasil pertanian yang dengan tanaman tebu.
Jumlah Penduduk	-	-
Mata	-	-

Faktor	Variabel	Kriteria	
Threat	Pencabarian Kelembagaan	-	
	Penggunaan lahan	Adanya pengembangan permukiman oleh <i>stakeholder</i> yang menyebabkan alih fungsi lahan di daerah penyangga	
	Kebijakan	Kecamatan Mojoroto merupakan pusat pengembangan sektor permukiman, pendidikan, industri dan wisata sehingga sektor tersebut dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat	
	Pengelolaan lahan	-	
	Partisipasi Masyarakat	Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk industri kecil di Kecamatan Kota mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyuluhan pertanian.	
	Jumlah Penduduk	Adanya perpindahan penduduk ke Kecamatan Mojoroto akan mengakibatkan perubahan guna lahan menjadi lahan terbangun	1. Tidak ada perpindahan penduduk ke Kecamatan Mojoroto sehingga tidak mengakibatkan perubahan guna lahan. 2. Adanya perpindahan penduduk ke Kecamatan Mojoroto namun tidak mengakibatkan perubahan guna lahan karena penduduk tidak bermukim 3. Adanya perpindahan penduduk ke Kecamatan Mojoroto yang mengakibatkan perubahan guna lahan menjadi lahan terbangun.
		Adanya daya tarik perkotaan yang tinggi hingga menyebabkan arus urbanisasi ke kota yang cukup tinggi dan mendesak daerah pingiran (penyangga)	1. Tidak ada daya tarik perkotaan yang tinggi hingga arus urbanisasi ke kota rendah dan tidak mendesak daerah pingiran (penyangga) 2. Adanya daya tarik perkotaan yang tinggi hingga menyebabkan arus urbanisasi ke kota yang cukup tinggi dan mendesak daerah pingiran (penyangga) 3. Adanya daya tarik perkotaan yang tinggi hingga menyebabkan arus urbanisasi ke kota yang tinggi dan mendesak daerah pingiran (penyangga)
	Mata	Sektor Industri pada Kecamatan Kota	1. Adanya pengembangan sector pertanian di daerah penyangga sehingga

Faktor	Variabel	Kriteria
	Pencapaian	<p>yang berkembang pesat menarik minat masyarakat untuk memilih sektor industri sebagai mata pencaharian untuk meningkatkan perekonomian.</p> <p>2. Sektor Industri pada Kecamatan Kota yang berkembang pesat menarik minat masyarakat untuk memilih sektor industri sebagai mata pencaharian untuk meningkatkan perekonomian.</p> <p>3. Adanya berbagai sektor pada Kecamatan Kota yang berkembang pesat menarik minat masyarakat untuk memilih mata pencaharian lain untuk meningkatkan perekonomian.</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Rangking didapatkan berdasarkan variabel SWOT yang telah digolongkan ke dalam kriteria. Sedangkan untuk pembobotan didapatkan dari hasil analisis AHP. Rangking variabel yang didapat dari AHP menentukan bobot dari setiap factor, variabel yang mendapatkan peringkat pertama pada analisis AHP mendapatkan bobot yang paling besar. Semakin rendah rangking variabel pada maka bobot yang didapatkan semakin rendah.

Tabel 4.32 IFAS Strategi Konservasi Daerah Penyangga Hutan Lindung di Kecamatan Mojojoto

Faktor	Variabel	Faktor-faktor internal	Bobot	Rangking	Bobot X Rangking
Strength	Kelembagaan	Adanya lembaga pemasyarakatan yang memiliki ahli dalam bidang pengelolaan fungsi kawasan dapat di manfaatkan sebagai konsultan/penasehat pada struktur kelembagaan.	0,076	3	0,228
		Adanya kelompok tani sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan (alat, bibit, pupuk) pertanian.	0,076	3	0,228
	Penggunaan lahan	Adanya persawahan dengan irigasi teknis yang ada di daerah penyangga sehingga alih fungsi lahan dapat dikendalikan.	0,036	2	0,072
		Keberadaan perkebunan campur dapat dijadikan sebagai salah satu aspek penyuluhan pemerintah.	0,036	2	0,072
		Penggunaan lahan yang berbatasan dengan hutan lindung sebagai tempat penyuluhan petani sehingga lahan yang berbatasan langsung dapat mendukung fungsi daerah penyangga	0,036	3	0,108
	Kebijakan	Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame ditetapkan sebagai daerah penyangga sehingga hutan lindung tidak mengalami kerusakan lingkungan.	0,033	3	0,099
		Pertanian lahan kering dipertahankan di kawasan pinggiran kota bagian timur tepatnya Kecamatan Mojojoto sehingga hasil produksi pertanian dapat dipertahankan.	0,033	2	0,066
	Pengelolaan lahan	Menggunakan peralatan sederhana sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah dan lebih ramah lingkungan.	0,028	3	0,084
		Irigasi memanfaatkan sumber air yang ada di hutan lindung sehingga pemanfaatan sumber daya yang ada lebih maksimal	0,028	3	0,084

Faktor	Variabel	Faktor-faktor internal	Bobot	Rangking	Bobot X Rangking
	Partisipasi Masyarakat	Pada kegiatan penyuluhan yang diadakan pemerintah, masyarakat (petani) bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan, namun ikut menyalurkan aspirasi.	0,054	2	0,108
	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk usia produktif merupakan jumlah penduduk terbanyak sehingga usaha pemberdayaan masyarakat dapat diterapkan.	0,039	3	0,117
	Mata Pencanharian	Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dapat mendukung usaha pemerintah dalam mempertahankan guna lahan pertanian	0,025	2	0,05
			0,5		1,316
Weakness	Kelembagaan	Kegiatan yang diadakan lembaga (kelompok tani dan karang taruna) tidak rutin dilakukan, sehingga kegiatan tidak berjalan lancar	0,078	3	0,234
		Kegiatan yang diadakan lembaga (kelompok tani dan karang taruna) tidak rutin dilakukan, sehingga kegiatan tidak berjalan lancar	0,078	2	0,156
	Penggunaan lahan	Mayarakat menjual lahan pertanian untuk pengembangan perumahan sehingga mengurangi lahan resapan	0,035	3	0,105
		Guna lahan yang tidak sesuai yaitu pada kawasan perlindungan setempat dapat menyebabkan bencana alam.	0,035	3	0,105
		Lahan permukiman yang terus bertambah, dikhawatirkan dapat mengakibatkan penambahan guna lahan terbangun dalam usaha penduduk untuk memenuhi fasilitasnya.	0,035	2	0,07
	Kebijakan	Kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah permukiman, pariwisata, industri dan pendidikan, dalam pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya	0,074	3	0,222
	Pengelolaan lahan	Mayoritas petani memiliki pendidikan terakhir tamat SD sehingga pengetahuan mengenai pengelolaan lahan terbatas.	0,056	2	0,112
	Partisipasi Masyarakat	Masyarakat (selain petani) mayoritas tidak mengetahui fungsi daerah penyangga sehingga hanya sedikit yang mengikuti kegiatan yang diadakan.	0,043	2	0,086
	Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk terus meningkat seiring dengan peningkatan guna lahan permukiman tiap tahunnya, sehingga usaha pemenuhan tempat untuk bermukim akan terus meningkat	0,037	3	0,111
	Mata Pencanharian	Penduduk paling banyak adalah belum bekerja sehingga belum dapat mendukung guna lahan pertanian (terbesar).	0,029	2	0,058
			0,5		1,259

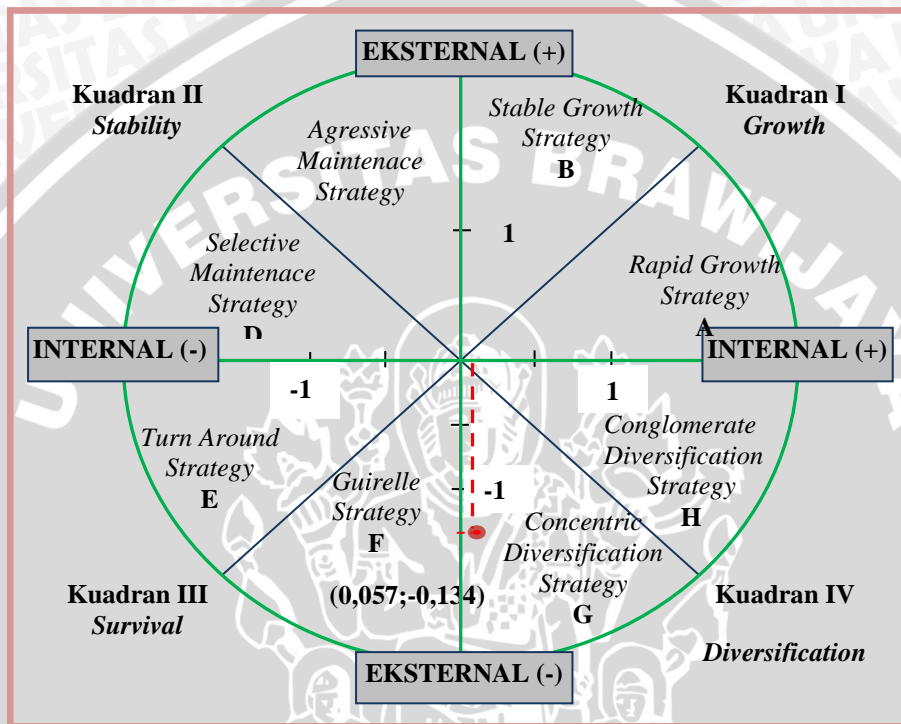
Tabel 4.33 EFAS Strategi Konservasi Daerah Penyangga Hutan Lindung di Kecamatan Mojo

Faktor	Variabel	Faktor-Faktor Eksternal	Bobot	Rangking	Bobot X Rangking
Opportunity	Kelembagaan	Adanya kerjasama antara kelembagaan dan pemerintah dalam penyuluhan pertanian sehingga menarik minat masyarakat aktif dalam suatu kegiatan.	0.121	3	0.363
	Penggunaan lahan	Pertanian yang ada di Kecamatan Mojo dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.	0.114	2	0.228
	Kebijakan	Pengembangan SWP Kediri, arahan pengelolaan kawasan untuk mempertahankan sawah irigasi yang ada Kelurahan Pojok dan Kelurahan Sukorame di Kecamatan Mojo sehingga konversi pertanian dapat dikendalikan.	0.103	2	0.206
	Pengelolaan lahan	Adanya berbagai teknik pengelolaan sebelum penanaman hingga hasil pertanian, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan sehingga masyarakat yang belum bekerja tertarik untuk bertani.	0.046	2	0.092
		Adanya kerjasama dengan pabrik gula di Kecamatan Pesantren untuk pengolahan hasil pertanian yang dengan tanaman tebu	0.046	3	0.138
	Partisipasi Masyarakat	Pengawasan dan evaluasi penyuluhan dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat merasa diperhatikan dan termotivasi mengikuti kegiatan.	0.07	3	0.21
			0,5		1,237
Threat	Penggunaan lahan	Adanya pengembangan permukiman oleh <i>stakeholder</i> yang menyebabkan alih fungsi lahan di daerah penyangga	0.121	3	0.363
	Kebijakan	Kecamatan Mojo merupakan pusat pengembangan sektor permukiman, pendidikan, industri dan wisata sehingga sektor tersebut dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat	0.108	3	0.324
	Partisipasi Masyarakat	Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk industri kecil di Kecamatan Kota mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyuluhan pertanian.	0.099	3	0.297
	Jumlah Penduduk	Adanya perpindahan penduduk ke Kecamatan Mojo akan mengakibatkan perubahan guna lahan menjadi lahan terbangun	0.043	3	0.129
		Adanya daya tarik perkotaan yang tinggi hingga menyebabkan arus urbanisasi ke kota yang cukup tinggi dan mendesak daerah pingiran (penyangga)	0.043	2	0.086
	Mata Pencarian	Sektor Industri pada Kecamatan Kota yang berkembang pesat menarik minat masyarakat untuk memilih sektor industri sebagai mata pencarian untuk meningkatkan perekonomian.	0.086	2	0.172
			0,5		1,371

Dari hasil perhitungan pembobotan masing-masing faktor dalam analisis IFAS-EFAS di atas, kemudian akan dihitung titik X dan titik Y untuk dibuat kuadran yang menunjukkan posisi titik di kuadran pemilihan strategi.

$$\begin{aligned} X &= \text{Kekuatan} + \text{Kelemahan} \\ &= 1,316 + (-1,259) \\ &= 0,057 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y &= \text{Peluang} + \text{Ancaman} \\ &= 1,237 + (-1,371) \\ &= -0,134 \end{aligned}$$



Gambar 4.24 Matriks Strategi IFAS-EFAS Konservasi Daerah Penyangga Hutan Lindung di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri

Berdasarkan hasil potensi dan masalah, konservasi daerah penyangga digolongkan dalam strength, weaknes, opportunity dan threat. Berdasarkan hasil matriks strategi IFAS-EFAS mengenai strategi konservasi daerah penyangga maka keseimbangan factor eksternal dan internal terdapat pada kuadran IV ruang G, lebih tepatnya *Concentric Diversification Strategy*. *Concentric Diversification Strategy* merupakan strategi strategi pengembangan obyek dilakukan secara bersamaan dalam satu naungan atau koordinator oleh satu pihak. Ancaman yang dimiliki oleh daerah penyangga lebih besar dibandingkan keunggulan. Strategi yang digunakan disesuaikan dengan faktor internal dan faktor eksternal di daerah penyangga di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

Aplikasi hasil matriks IFAS-EFAS pada daerah perencanaan jika didasarkan isu pengembangan wilayah yang ada pada dokumen perencanaan tepat dilakukan. Isu

pengembangan wilayah menyebutkan adanya pengembangan pusat kegiatan pada kawasan penyangga. Perencanaan wilayah yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan tersebut didasarkan pada potensi guna lahan yang ada di kawasan penyangga berupa guna lahan wisata dan pendidikan. Pada kondisi eksisting usaha pemerintah bersama masyarakat telah berusaha dalam menekan perubahan guna lahan dengan melestarikan guna lahan tidak terbangun yaitu sawah dan perkebunan terus ditingkatkan. Namun ancaman perubahan guna lahan terus terjadi, terlihat pada tahun 2007 hingga tahun 2012 guna lahan yang meningkat luasannya adalah permukiman. Oleh karena itu pengembangan daerah penyangga harus dikoordinatori oleh satu pihak dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak agar konservasi semua variabel yang dilakukan bersamaan dapat terkoordinasi dengan baik.

4.8 Strategi Konservasi Daerah Penyangga Hutan Lindung di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri

Strategi konservasi penyangga hutan lindung di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri dijalankan secara bersamaan berdasarkan hasil dari IFAS-EFAS yaitu *Concentric Diversification Strategy*. Strategi konservasi dibagi menjadi dua aspek yaitu dari aspek fisik lingkungan dan dari aspek non fisik.

4.8.1 Aspek Fisik Lingkungan

Aspek fisik lingkungan terbagi atas dua variabel yaitu penggunaan lahan dan pengelolaan lahan. Berdasarkan hasil dari kemampuan dan kesesuaian lahan Kecamatan Mojojoto diketahui fungsi lahan yang berupa kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budidaya tanaman tahunan, kawasan budidaya tanaman semusim. Untuk guna lahan yang terdapat pada kawasan penyangga adalah guna lahan militer, sawah, hutan produksi pemerintahan, pendidikan, permukiman, RTH dan olahraga serta sosial budaya yang berupa museum dan kawasan wisata.

Konservasi daerah penyangga untuk penggunaan lahan secara umum adalah dilakukan penataan guna lahan yang ada pada daerah penyangga dengan *zoning regulation*, melakukan tindakan konservasi secara mekanik dan vegetative agar sawah irigasi tidak beralih fungsi. Strategi konservasi lahan pada daerah penyangga diarahkan agar sesuai dengan ketentuan pemanfaatan lahan sesuai dengan kegunaannya. Sedangkan untuk pengelolaan lahannya strateginya adalah Mempertahankan penggunaan peralatan yang ramah lingkungan dalam

mengelola lahan, memanfaatkan mata air yang ada di hutan lindung sebagai sumber irigasi dan pemenuhan kebutuhan dengan teknik pengelolaan secara partisipatif.

Penggunaan lahan pada daerah penyangga dibedakan atas guna lahan utama (Gambar 4.25), guna lahan yang dipertahankan (Gambar 4.26), dan guna lahan yang dikendalikan pengembangannya (Gambar 4.27). Secara lebih rinci konservasi guna lahan di daerah penyangga akan dijabarkan untuk masing-masing guna lahan.

1. Persawahan/ Pertanian

Untuk lahan pertanian dengan kemiringan 0-6% (datar) dapat dilakukan tindakan konservasi secara vegetatif ringan tanpa tindakan konservasi secara mekanik. Pada guna lahan pertanian dengan ketinggian 8-15% (landai) arahan konservasinya adalah tindakan konservasi vegetatif ringan sampai berat dan tindakan konservasi mekanik (ringan). Untuk tindakan konservasi vegetatifnya yaitu pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pupuk hijau, pengembalian bahan organik, tanaman penguat keras. Sedangkan untuk tindakan konservasi mekaniknya meliputi teras gulud disertai tanaman penguat keras.

Kemiringan 15-40% yang menurut SK Pertanian termasuk ke dalam klasifikasi agak curam. Arahan untuk guna lahan pertanian yang dapat dilakukan di daerah ini meliputi tindakan konservasi secara vegetative (berat) dan tindakan konservasi secara mekanik berat. Untuk tindakan konservasi secara vegetatif (berat) adalah dilakukannya pergiliran tanaman, pemberian pupuk kandang, pupuk hijau, penanaman menurut kontur. Sedangkan untuk tindakan konservasi mekanik (berat) adalah dilakukannya teras bangku yang dilengkapi tanaman atau penguat teras dan rokrak.

Pertanian yang ada di Kecamatan Mojojoto merupakan pertanian yang masuk dalam administrasi Kota Kediri. Untuk itu perkembangan pertanian dapat diarahkan menggunakan *Urban Agriculture*, dengan luasan persawahan yang semakin berkurang karena lahan terbangun maka persawahan yang ada pada saat ini dapat dipertahankan. Telah dijelaskan bahwa pada kondisi eksisting, produktivitas pertanian di Kecamatan Mojojoto adalah yang tertinggi di Kota Kediri. Oleh karena itu guna lahan ini ditetapkan sebagai guna lahan utama yang perlu dikembangkan di daerah penyangga dan untuk mendukung guna lahan ini perlu diterapkan program *Urban Agriculture*, agar hasil dari pertanian dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu program yang dapat diterapkan adalah pembentukan suatu Badan Kebijakan yang melibatkan petani, para ahli pertanian, penjual bahan pangan dan

perwakilan kelompok masyarakat dengan peran utama untuk meningkatkan dan mendukung organisasi lokal.

Penggunaan lahan pertanian pada kawasan penyangga tidak menyalahi kriteria umum kawasan penyangga. Namun untuk menjaga kondisi tanah dan menghindari adanya kerusakan lahan maka untuk guna lahan pertanian perlu diterapkan pengelolaan pertanian yang berkelanjutan. Terdapat berbagai macam konsep pengelolaan lahan berkelanjutan yaitu *natural farming*, *organic farming* dan mengurangi pengelolaan tanah. Namun konsep pengelolaan yang dapat diterapkan adalah *Natural Farming*. Konsep pertanian ini lebih menekankan pada meminimalisir atau tidak menggunakan bahan-bahan kimia seperti pestisida dan pupuk organik. Selain itu diarahkan untuk menggunakan sistem terasering pada lahan dengan kemiringan agak curam untuk mempertahankan kualitas tanahnya dan menghindari terjadinya ancaman bencana.

2. Hutan Produksi

Hutan produksi termasuk guna lahan yang dipertahankan. Hutan produksi pada kawasan penyangga memiliki skoring fisik wilayah dengan nilai 105 dan tidak tergolong kawasan lindung, berada di luar hutan suaka alam dan hutan konvensi lainnya. Oleh karena itu hutan produksi ini termasuk kedalam hutan produksi tetap. Karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan hutan lindung dan adanya guna lahan militer di dekat daerah ini maka arahan konservasi untuk daerah ini adalah dipertahankan sebagai hutan produksi dan pelarangan adanya konversi lahan, karena dikhawatirkan akan menyebabkan lahan kritis dan bencana longsor.

3. Militer

Guna lahan militer termasuk dalam guna lahan yang dipertahankan dengan perlakuan khusus, karena tidak menarik aktifitas masyarakat umum sehingga kemungkinan perubahan fungsi sangat kecil. Namun pada kondisi eksisting guna lahan ini berada pada kawasan perlindungan setempat yang seharusnya terhindar dari guna lahan terbangun. Untuk kegiatan masyarakat di guna lahan ini tidak terlalu tinggi intensitasnya (bukan guna lahan yang dapat menarik aktivitas masyarakat). Oleh karena itu arahan untuk guna lahan ini adalah dibatasi pengembangannya agar tidak menambah lahan terbangun di daerah penyangga.

4. Pemerintahan

Guna lahan pemerintahan termasuk ke dalam guna lahan yang dipertahankan dengan perlakuan khusus, karena setelah dianalisis kesesuaian lahannya guna lahan ini berada pada kawasan perlindungan setempat. Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan memindahkan areal perkantoran ini ke daerah lain yang bukan daerah lindung. Namun guna lahan ini tidak menyebabkan tarikan aktivitas masyarakat, maka hal lain yang dapat dilakukan adalah tetap berada pada tempat tersebut tanpa ada pengembangan guna lahan terbangun dan tidak boleh ada perubahan guna lahan yang dapat menarik aktivitas masyarakat.

5. Pendidikan

Guna lahan ini merupakan guna lahan yang dipertahankan, karena pendidikannya adalah skala local maka tarikan aktivitas masyarakatnya tidak besar. Strategi untuk kawasan ini adalah dibatasi adanya pengembangan berupa lahan terbangun. Lokasi pendidikan yang dekat dengan kawasan wisata dapat diarahkan untuk saling melengkapi agar arahan untuk ekowisata berupa pemberian pengetahuan kepada masyarakat dapat dilakukan di kawasan pendidikan. Oleh karena itu kawasan pendidikan dapat dijadikan pusat informasi menjadi hal yang penting dan dapat juga dijadikan pusat kegiatan dengan tujuan meningkatkan nilai dari pengalaman seorang turis yang bisa memperoleh informasi yang lengkap tentang lokasi atau kawasan dari segi budaya, sejarah, alam, dan menyaksikan acara seni, kerajinan dan produk budaya lainnya.

6. RTH dan Olahraga

Guna lahan merupakan guna lahan yang dipertahankan karena merupakan guna lahan yang tidak terbangun sehingga masih dapat meresapkan air ke dalam tanah. Guna lahan ini dimanfaatkan masyarakat sebagai lapangan sepak bola, lapangan voli. Jenis guna lahan ini tidak merugikan dan tidak memberikan dampak negatif terhadap kawasan lindung selain itu guna lahannya bukan merupakan guna lahan terbangun. Oleh karena itu guna lahan ini dimanfaatkan sesuai fungsinya tanpa melakukan pengembangan lahan terbangun agar tidak menarik kegiatan lain selain fungsi RTH dan olahraga.

7. Sosial Budaya (Museum dan wisata)

Guna lahan sosial budaya termasuk guna lahan yang dipertahankan dengan perlakuan khusus karena merupakan kawasan wisata sejarah yang tidak dapat dialih fungsikan. Kawasan sosial budaya ini berupa museum Airlangga dan wisata Goa Selomangleng. Arahan untuk museum adalah pelestarian sejarah yang ada di Kecamatan Mojoroto. Guna lahan ini dibatasi

pengembangan lahan terbangunnya. Namun untuk pengenalan sejarah terhadap masyarakat diperbolehkan seperti melakukan pagelaran sejarah kota, pengenalan lingkungan terhadap warga untuk mengenalkan pentingnya daerah lindung dan penyangga. Selain menjadi museum sejarah juga dapat menjadi tempat pengenalan lingkungan terhadap warga.

Kawasan wisata yang ada didaerah penyangga ini adalah Goa Selomangleng yang areanya berbatasan langsung dengan hutan lindung. Arahannya untuk kawasan ini adalah tidak merubah kondisinya dengan memanfaatkan alam sebagai daya tariknya, agar aktivitas yang ada pada kawasan pariwisata ini tidak menyebabkan kegiatan yang dapat memicu perambahan pada kawasan hutan dengan konsep ekowisata. Prinsip pengembangan ekowisata pada kawasan Goa Selomangleng meliputi:

a. Pelestarian

Pelestarian dilakukan bertujuan untuk membatasi kegiatan agar tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pelestarian ini dapat diwujudkan dengan tidak melakukan penambahan bangunan secara fisik pada area wisata, karena lokasi wisata berbatasan langsung dengan daerah lindung. Oleh karena itu apabila terjadi pengembangan secara fisik akan dapat menyebabkan tutupan hutan. Selain itu perlu dilakukan pengelolaan limbah yang ada pada daerah wisata dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat sekitar.

b. Pendidikan

Memberikan unsur pendidikan pada kegiatan kepariwisataan adalah cara yang baik untuk menambah pengetahuan wisatawan yang berkunjung. Salah satu wujud kegiatannya adalah dengan memberikan informasi berupa brosur mengenai kawasan wisata beserta kegiatan yang diperbolehkan di daerah penyangga, pemberian papan nama dan manfaat pada tanaman maupun informasi mengenai manfaat hutan lindung.

c. Pariwisata

Kegiatan pariwisata memiliki tujuan memberikan kesenangan dan kepuasan terhadap pengunjungnya. Kegiatan ini dapat diwujudkan dengan memberikan fasilitas wisata yang memadai dengan mempertahankan prinsip pelestarian kawasan. Agar tidak melakukan perkembangan lahan terbangun, daya tarik wisata dapat diwujudkan dengan mengembangkan kegiatan yang menonjolkan kebudayaan daerahnya seperti pertunjukan kesenian daerah yang berupa tarian daerah atau pertunjukan kisah

pewayangan. Lokasi wisata yang berada pada daerah pegunungan dapat dimanfaatkan dengan kegiatan *tracking* alam. *Tracking* alam dapat diwujudkan dengan memanfaatkan keindahan alam sekitar daerah wisata seperti hutan produksi, museum airlangga, dan daerah penyuluhan pertanian.

d. Ekonomi

Kegiatan pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap wisatawan yaitu dengan membrikan jasa transportasi atau jasa pemandu wisata.

e. Partisipasi masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam ekowisata dapat diwujudkan dengan menyertakan masyarakat dalam pengelolaan kawasan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan wisata tanpa melakukan pengembangan lahan terbangun.

8. Permukiman

Permukiman merupakan guna lahan yang dikendalikan perkembangannya, karena merupakan tempat bermukim penduduk dan dapat menimbulkan tarikan penambahan penduduk. Lokasi permukiman dilihat dari kemiringannya, maka tidak melanggar peraturan pengembangan kawasan budidaya yaitu kemiringan datar sampai bergelombang yaitu kelerengan lahan 0-25. Guna lahan merupakan prioritas kedua setelah kelembagaan, oleh karena itu untuk menghindari dampak yang lebih besar dari pengembangan guna lahan ini maka pengendalian untuk guna lahan permukiman terbagi menjadi 3 zona bagian berdasarkan lokasinya, yaitu: (Gambar 4.27)

a. Zona 1 (Permukiman yang berbatasan langsung dengan hutan lindung)

Bangunan yang telah ada diperkenankan dengan selama dapat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konservasi serta untuk bangunan baru tidak diijinkan. Namun guna lahan ini dapat menimbulkan tarikan kegiatan warga dan warga yang bermukim di daerah ini dikhawatirkan dapat melakukan kegiatan di daerah lindung, maka secara bertahap dikembalikan pada fungsinya, dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi setempat, dan kemampuan pemerintah disertai penggantian yang layak. Selain itu usaha yang dapat dilakukan

agar bangunan baru tidak bertambah adalah dengan tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya.

b. Zona 2 (Permukiman yang berada pada kawasan perlindungan setempat)

Kawasan perlindungan setempat merupakan bagian dari kawasan lindung yang seharusnya bebas dari guna lahan budidaya. Oleh karena itu bangunan yang ada dalam kawasan ini dikenai pajak khusus secara progresif yang digunakan untuk kompensasi biaya pemulihan dan pemeliharaan lingkungan. Nilainya dihitung berdasarkan kerusakan

lingkungan yang ditimbulkan. Serta tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan budidaya agar tidak muncul bangunan baru pada kawasan ini. Sedangkan yang belum terbangun dilarang memberikan IMB.

c. Zona 3 (Permukiman yang dekat dengan kawasan pendidikan)

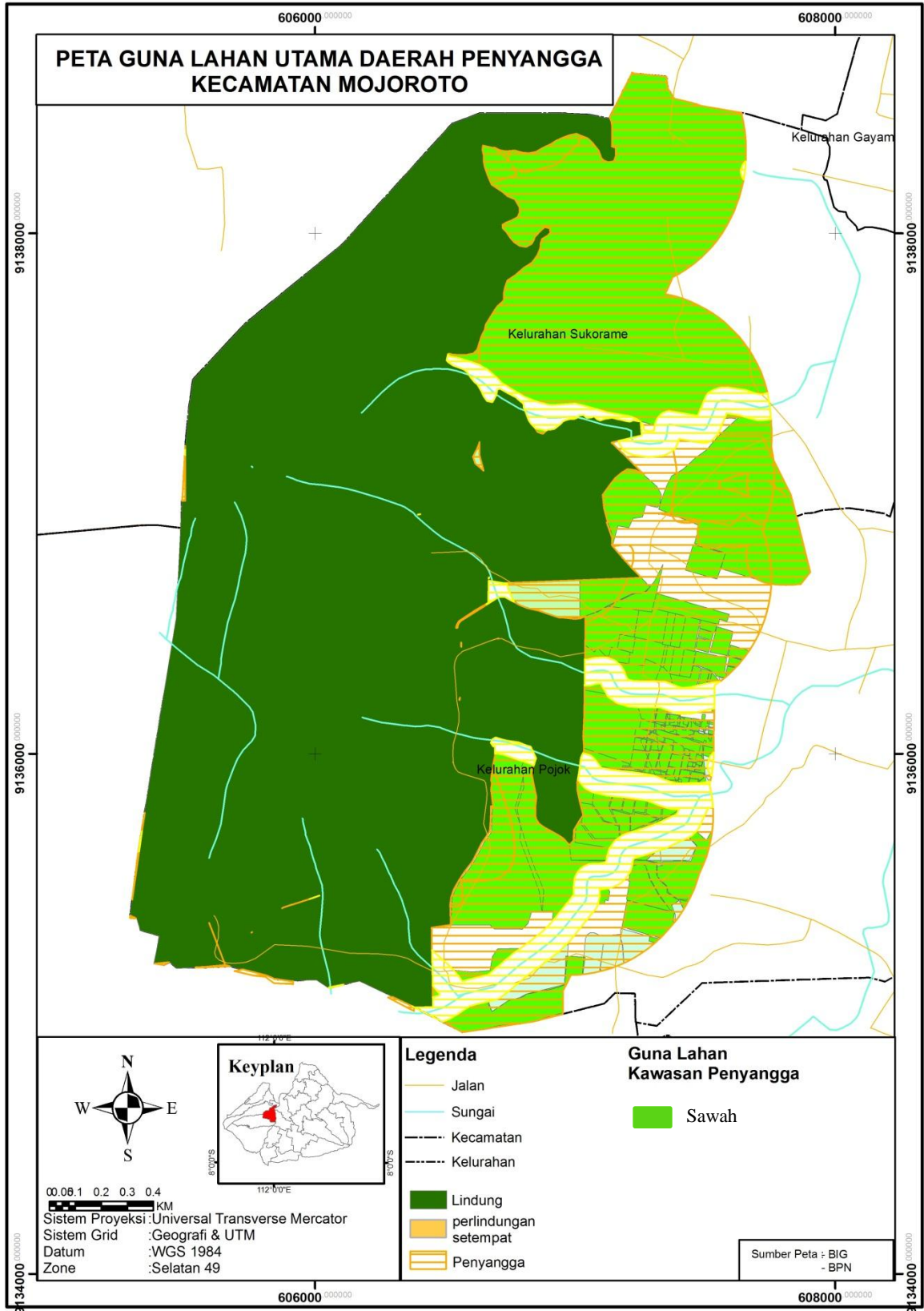
Permukiman yang berada disekitar kawasan pendidikan sebagian besar menyediakan jasa kos. Karena permukiman tidak berada pada daerah lindung maka diijinkan adanya pemberian sarana dan prasarana penunjang namun tidak diijinkan penambahan bangunan yang berupa guna lahan permukiman agar tidak menambah intensitas aktivitas penduduk. Arahan untuk permukiman di daerah ini adalah tetap pada fungsinya baik berupa rumah penduduk atau jasa kosan tanpa melakukan pengembangan lahan terbangun. Jika terjadi pengembangan lahan terbangun maka dikenakan disinsentif berupa pengenaan pajak bangunan yang tinggi.

4.8.2 Aspek Non Fisik

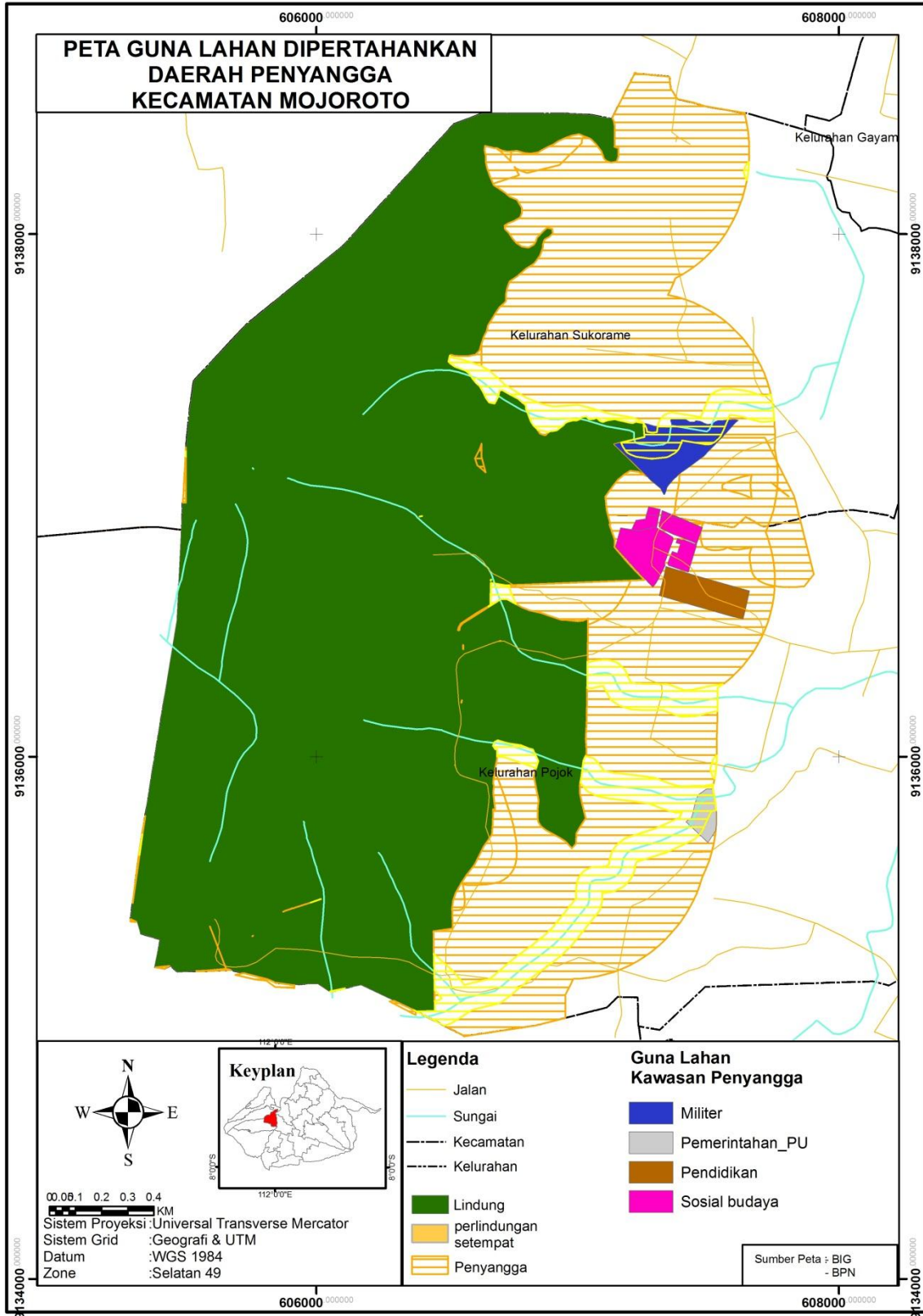
Aspek non fisik melingkupi kependudukan, partisipasi masyarakat, mata pencaharian, kelembagaan. Jika masyarakat memiliki kepedulian terhadap lingkungan, maka akan senantiasa melindungi lingkungan disekitarnya agar tidak terjadi kerusakan. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan

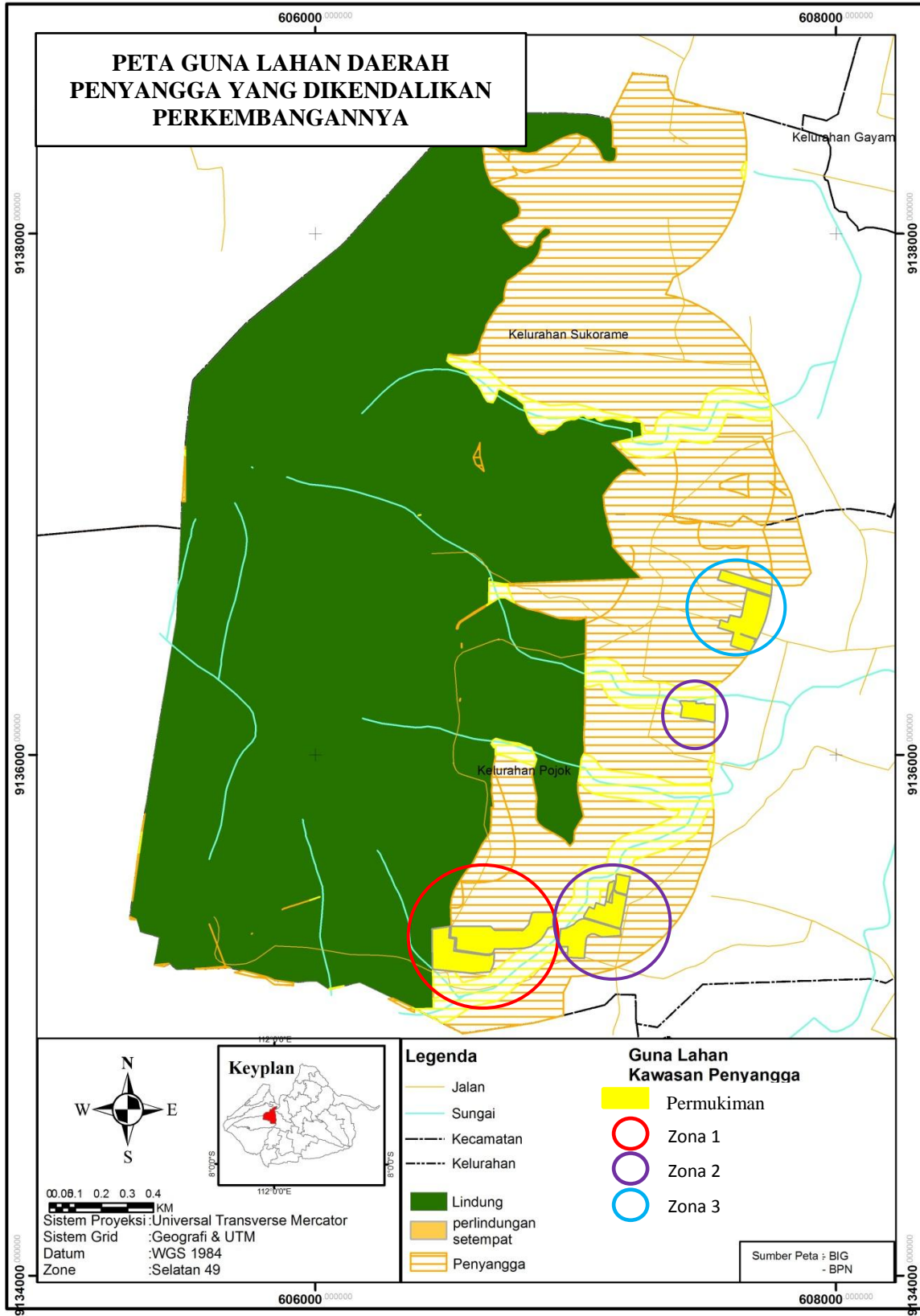
Strategi konservasi kelembagaan secara umum yaitu kelembagaan tani menjalankan kegiatan penyuluhan secara rutin sesuai yang dijadwalkan pemerintah, memperbaiki struktur kelembagaan dengan lembaga pemasyarakatan sebagai penasehat dan pemerintah sebagai pengawas kegiatan. Secara terperinci strategi ini akan dijelaskan untuk masing-masing lembaga yang ada di kawasan penyangga.



Gambar 4.25 Peta Guna Lahan Utama Daerah Penyangga Hutan Lindung



Gambar 4.26 Peta Guna Lahan yang Dipertahankan Daerah Penyangga Hutan Lindung



Gambar 4.27 Guna Lahan yang Dibatasi Pengembangannya di Daerah Penyangga

a. Lembaga tani

Struktur kelembagaan lembaga tani di kawasan penyangga sangat sederhana dan kurang berjalan dengan baik karena setiap unit usaha terlalu banyak menangani permasalahan dan menyusun rencana kegiatan. Oleh karena itu pada kelompok tani unit usahanya perlu ditambah agar pekerjaan tidak terlalu berat untuk satu unit usaha tani. Unit usaha yang perlu ditambah adalah divisi transportasi, divisi pengolahan, divisi bibit, divisi SDM, divisi teknis.

b. Lembaga pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan yang bertempat di Kelurahan Pojok adalah lembaga yang bergerak di bidang pertanian. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan penyuluhan terhadap petani. Pada kondisi eksistingnya lembaga ini memiliki ahli dalam hal pengembangan wilayah. Arahannya untuk lembaga ini adalah dapat menjadi penasihat/ konsultan untuk setiap lembaga yang ada, bukan hanya untuk lembaga tani saja.

c. Lembaga karang taruna

Karang taruna merupakan lembaga yang tergolong lembaga yang pasif. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan oleh karang taruna tidak terkoordinasi dengan baik. Banyak kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana kegiatan yang ada. Sama halnya dengan lembaga tani, karang taruna juga memerlukan tambahan unit usaha/sieagar kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana. Sie pada lembaga karang taruna ditambah agar lebih banyak pilihan kegiatan sehingga generasi muda lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan. Sie yang perlu ditambahkan adalah sie Seni budaya, rohani dan humas, sie komunikasi dan publikasi.

2. Kebijakan

Strategi konservasi untuk variabel kebijakan secara umum adalah arahan kebijakan pengembangan daerah penyangga sebagai pusat pelestarian alam dan sejarah, arahan untuk sector pertanian sebagai pusat penyuluhan pertanian di Kota Kediri. Demi mewujudkan kebijakan untuk menghindari konversi lahan dan mendukung konservasi untuk penggunaan lahan yaitu penetapan *zoning regulation*. Pada peraturan tersebut secara rinci akan dijelaskan mengenai hal yang diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan terkait dengan pemanfaatan lahan. Kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak boleh menyebabkan kerusakan lingkungan

atau memberikan dampak negatif. Selain itu peraturan mengenai tindakan konservasi mekanis dan tindakan konservasi vegetasi perlu diterapkan sesuai dengan kemiringan lahan pertanian.

3. Jumlah Penduduk

Strategi konservasi untuk mengatasi jumlah penduduk adalah mempersulit pembuatan KK, dan mengadakan kegiatan pemberdayaan pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan untuk masyarakat produktif. Untuk mendukung guna lahan utama (pertanian) perlu ada kegiatan pengelolaan hasil pertanian, karena belum ada kegiatan pengelolaan hasil pertanian. Kegiatan untuk masyarakat yang masih produktif lebih diarahkan untuk melakukan kegiatan yang dapat mendukung kegiatan bertani. Selain membentuk dan melaksanakan kegiatan pengelolaan hasil pertanian, alternatif lain yang dapat dilakukan adalah membentuk dan melaksanakan kegiatan pengelolaan perkebunan dan hasil perkebunan.

4. Partisipasi Masyarakat

Strategi konservasi partisipasi masyarakat berdasarkan analisis secara umum adalah pemberdayaan masyarakat untuk mengelola hasil pertanian dan perkebunan yang ada di daerahnya dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk membentuk kegiatan atas inisiatif sendiri. Masyarakat akan lebih termotivasi dan lebih bertanggung jawab jika kegiatan yang dilakukan adalah hasil dari pemikirannya. Tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, masyarakat diharapkan dapat membangun daerahnya sesuai dengan fungsi kawasan, dengan begitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan dapat meningkat.

5. Mata Pencaharian

Strategi konservasi untuk mata pencaharian adalah menetapkan insentif dan disinsentif bagi masyarakat yang bersedia turut serta dalam pengelolaan lahan pertanian guna menjaga kelestarian lingkungan. Dilakukan agar jumlah penduduk yang belum bekerja akan berkurang dan jumlah penduduk yang bertani akan semakin bertambah dengan begitu guna lahan utama (pertanian) dapat dipertahankan. Insentif dan disinsentif yang dapat ditetapkan adalah dengan memberikan *reward* kepada masyarakat yang bertani dengan segala kegiatannya berupa bantuan dana dari pemerintah atau bantuan berupa penyaluran hasil pertanian oleh pemerintah ke pasar. Oleh karena itu untuk mendukung usaha pemerintah dalam mempertahankan guna lahan adalah dengan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya petani dan segala kegiatan yang dilakukannya.